

Gule Kabung

Gubernur Langsung
Eksekusi Kerja Bersama
Membangun Bangka Belitung



Dr. Suganda P. Pasaribu, AP., M.Si., M.Si

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung

Gule Kabung

Gubernur Langsung
Eksekusi Kerja Bersama
Membangun Bangka Belitung

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- [1] Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- [2] Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- [3] Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- [4] Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Jakarta:
KPG [Kepustakaan Populer Gramedia]

Gule Kabung

@ Suganda Pandapotan

KPG: 59 24 02257

Cetakan Pertama, Juni 2024

Penulis

Hilmi Faiq

Rini Kustiasih

Penyunting

Alpha Hambally

Perancang Sampul dan Penata Letak

Wendie Artswenda

Dokumentasi Foto

Diskominfo/Babel

FAIQ, Hilmi & Rini Kustiasih

Gule Kabung: Gubernur Langsung Eksekusi Membangun Bangka Belitung
Jakarta; KPG [Kepustakaan Populer Gramedia], 2024

xx + 88 hlm.; 13,5 x 20 cm

ISBN: 978-623-134-221-8

ISBN Digital: 978-623-134-222-5

Foto sampul: Sejumlah kegiatan Gule Kabung. Dokumentasi Diskominfo/Babel

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Daftar Isi

Sambutan Ketua Umum PB NU	x
Sambutan Ketua Ombudsman RI	xiii
Kata Pengantar	xvi

BAB I

PENDAHULUAN

• Selayang Pandang Bangka Belitung	3
• Bangka Belitung di Era Kerajaan	3
• Timah dan Berakhirnya Era Kerajaan	6
• Bangka Belitung dalam Angka	8
• Program Gule Kabung	11
• <i>Manifestasi Gule Kabung</i>	11

BAB II

MERENDA GENERASI EMAS BABEL

• Menurunkan Prevalensi Stunting	19
• Mengandalkan Kolaborasi	23

BAB III	
MENOLONG SI MISKIN	27
BAB IV	
MENJAGA DAYA BELI RAKYAT	35
• Mengendalikan Inflasi	35
• Optimalisasi Peran Pemda	40
BAB V	
TEROBOSAN INOVATIF	49
• Family Supportive Group	54
• Keluarga Menolak	56
BAB VI	
EVALUASI	61
• Prinsip Good Governance	63
• Kesan Positif	69
• Makna Kehadiran	70
• Keuntungan	73
• Tantangan	74
• Alternatif	75
TAPAK LANGKAH Suganda Pandapotan Pasaribu	77

Halaman Dedikasi

Sambutan

K.H. Yahya Cholil Staquf

Ketua Umum PBNU

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rahayu.

KITA TAK bisa memungkiri bahwa pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai ke bawah, adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat secara berjenjang. Pemerintah daerah lah yang paling mengerti bagaimana situasi, kondisi, dan kebutuhan riil masyarakat. Kenyataan ini seharusnya melatarbelakangi para pemangku kepentingan agar berlaku lebih aktif dan progresif dalam menerjemahkan apa yang dibutuhkan—sekaligus dapat bersinergi bersama—masyarakat. Di era yang begitu cepat berjalan ini, apabila kita tidak ikut mendayung, maka ketertinggalan benar-benar nyata di depan mata.

Ketika ada petani yang lahannya rusak karena kondisi perubahan iklim. Ketika ada masyarakat yang memerlukan akses ke pelayanan kesehatan. Ketika ada sebuah desa yang belum tersentuh listrik. Ketika ada masyarakat yang benar-benar tidak memiliki ruang ke lapangan pekerjaan, dan seterusnya dan sebagainya. Bagaimana seharusnya lembaga pemerintahan melakukan pelayanan yang terbaik dan tepat sasaran kepada publik? Bagaimana seharusnya lembaga pemerintahan menerapkan *good governance* yang dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak? Ini adalah pertanyaan lama yang cara menjawabnya menuntut kebaruan ide dan kemandirian untuk melakukannya.

Kita patut bersyukur bahwa hari ini semakin banyak pemerintahan daerah yang berlomba dalam menunjukkan yang terbaik dari provinsi masing-masing. Salah satu yang menarik perhatian saya belakangan ini adalah sebuah program yang berlangsung di provinsi yang terkenal dengan budaya toleransi, penghasil timah, dan novel *Laskar Pelangi* punya cerita. Yaitu Kepulauan Bangka Belitung. Gule Kabung, nama program tersebut bergaung, akronim dari Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung yang digagas oleh Pejabat (Pj) Gubernur Babel, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP, MSi, MSi. Menariknya, program ini digagas bukan oleh seorang pejabat dengan latar belakang politik, melainkan murni pengalaman dan kesadaran birokratik.

Gule Kabung adalah bentuk nyata bagaimana seharusnya pelayanan publik diterapkan oleh sebuah pemerintahan daerah. Program ini meminimalisir diskomunikasi antarlini. Gubernur turun langsung bersama bupati, walikota, camat, kepala desa, seluruhnya untuk terlibat, bahkan menggandeng sektor swasta untuk berkontribusi. Mereka mendengar secara langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat. Forum tersebut kemudian me-

lahirkan solusi yang tepat atas persoalan yang terjadi tanpa perlu dibatasi oleh sekat-sekat institusional dan rumitnya birokrasi.

Melalui sistem komunikasi demikian dan apabila berlangsung kontiniu, besarlah harapan bahwa publik dapat dilayani dengan tepat. Persoalan mengenai kurangnya lapangan kerja, lansia yang menderita suatu penyakit yang tidak tahu harus berobat ke mana, tingginya angka stunting, dan lain-lain dapat diatasi dengan baik oleh sebuah pemerintahan daerah siapa pun pemimpinnya. Gule Kabung mengubah secara kultural pola komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta yang selama ini tersekat.

Saya mewakili PBNU mengucapkan selamat atas Program Gule Kabung yang telah terlaksana beserta penerbitan buku ini. Banyak sekali program pemerintah tingkat kabupaten/kota dan kecamatan di pelbagai provinsi yang tidak tercatat, sehingga kebijakan, hasil, tantangan, hingga evaluasi sukar diwariskan untuk masa berikutnya. Buku ini adalah bukti bahwa Program Gule Kabung hendak menjadi konsisten dan bernilai *sustainability*. Mungkin sekali Program Gule Kabung menjadi *role-model* pelayanan publik yang dapat diterapkan di kota-kota lainnya di Indonesia. Kita semua boleh berharap. Dan mungkin inilah salah satu dimensi yang dimaksud dengan pembanguann dari bawah

Terima kasih dan sukses selalu ke depannya untuk Kepulauan Bangka Belitung.

Wassalam
Jakarta, 16 Februari 2024
Ketua Umum PBNU

K.H. Yahya Cholil Staquf

Sambutan

Mokhammad Najih
Ketua Ombudsman RI

DENGAN PENUH rasa bangga, saya ingin mengucapkan selamat atas terbitnya buku tentang program Gule Kabung di Bangka Belitung. Adanya buku ini menjadi satu langkah berarti yang telah diawali oleh langkah-langkah sebelumnya untuk menyambut langkah-langkah kebaikan berikutnya.

Selama delapan bulan mendapat amanah sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu merancang sebuah ruang dan program yang hendak menjawab bagaimana mengutamakan pelayanan publik. Demoktatisasi pelayanan publik menjadi fokus program Gule Kabung. Program ini menysasar lapisan masyarakat yang secara sadar maupun tidak, suara mereka kerap tidak terdengar.

Berbagai program di dalam Gule Kabung adalah cermin dari dedikasi dan komitmen dalam melayani masyarakat dengan baik. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi pelayanan publik, Ombudsman RI senantiasa berupaya untuk menjadi mitra yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik di seluruh pelosok negeri, termasuk di Bangka Belitung.

Bagi saya, buku ini tidak hanya sekadar dokumentasi, namun juga sebuah cerminan dari perjalanan panjang yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai hasil yang bermakna bagi masyarakat. Melalui Gule Kabung, kita tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pendampingan, edukasi, dan pengembangan potensi lokal untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Saya percaya bahwa pembaca buku ini, yang mayoritas adalah para pemangku kepentingan, akan mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi tentang bagaimana sebuah program dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Lebih dari itu, buku ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya peran kita dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Peran Ombudsman RI dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak bisa dipandang sebelah mata. Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Saya selalu mengatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga independen, yang bisa menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa takut mendapat intervensi dari kekuasaan lain. Ombudsman adalah lembaga yang merdeka. Oleh karena itu, Ombudsman akan berupaya untuk menjadi lembaga negara yang kuat, eksis secara tugas dan fungsinya di mata masyarakat, serta mampu menyelesaikan laporan dengan tepat waktu. Dengan begitu akan terwujud *good and clean governance*.

Semoga konsep Gule Kabung bisa berlanjut bukan hanya di Bangka Belitung, tetapi juga di tempat-tempat lain dan diterapkan sesuatu konteks lokal masyarakat.

Akhir kata, semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Terima kasih.

Jakarta, 01 April 2024
Ketua Ombudsman RI

Mokhammad Najih

Kata Pengantar

Suganda Pandapotan Pasaribu

*Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
[Maret-November 2023]*

Assalamualaikum WW
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan.

TERIRING PUJI dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku ini dapat hadir di tangan sidang pembaca sekalian. Buku ini adalah cuplikan perjalanan selama sekitar delapan bulan saya menjadi penjabat Gubernur Bangka Belitung. Dalam perjalanan yang singkat itu, saya beruntung dapat melayani warga Bangka Belitung dengan lebih konkret melalui program Gule Kabung.

Buku ini memang secara khusus memotret sebagian kecil dari perjalanan saya menjalankan program tersebut. Program Gule Kabung ini dapat dirumuskan berkat inspirasi yang berasal dari kearifan lokal warga Bangka Belitung. Gule yang berarti gula, dan Kabung yang berarti aren, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bangka Belitung yang majemuk dan penuh warna.

Sejak lama saya berusaha merumuskan suatu pendekatan *good governance* yang dapat secara aplikatif mengeksekusi dan mengatasi kesulitan atau kendala yang dihadapi warga di lapangan. Bagi saya, kepemimpinan haruslah solutif dan dapat segera dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Untuk mewujudkan itu, diperlukan kemauan dan kesadaran pemimpin untuk turun ke lapangan dan melihat langsung kesulitan yang dihadapi masyarakatnya.

Hanya dengan pendekatan langsung yang menyimbolkan kepedulian dan kemauan mendengar itulah, pemimpin dapat menyerap problematika rakyatnya, dan kemudian merumuskan kebijakan maupun mengeksekusi solusinya.

Dalam pendekatan yang demikian, saya meyakini kepemimpinan yang kolaboratif dan sinergis adalah jawabannya. Sebab, pemimpin tidak dapat bekerja sendiri. Pemimpin memerlukan juga dukungan, bantuan, dan sokongan dari berbagai pihak. Suatu *good governance* adalah pendekatan sistemik yang mensyaratkan adanya kerja sama dan kolaborasi, bukan *one man show*.

Dengan konsep kepemimpinan itu, saya berusaha mengelaborasinya ke dalam suatu program riil yang dapat menynergiskan semua pihak, instansi terkait, organisasi perangkat daerah, termasuk kepala daerah di setiap kabupaten/kota dalam menysasar persoalan tertentu.

Setelah lama berpikir dan berdialog dengan sejumlah pihak, saya menemukan Gule Kabung sebagai suatu sintesa yang dapat menyatukan konsep-konsep itu. Gula aren yang disarikan dari pohon aren memiliki filosofi yang mendalam, dan selaras dengan konsep *good governance* yang sedang saya susun.

Pohon aren memiliki banyak keistimewaan. Ia dapat hidup berdampingan dengan beragam jenis pohon lainnya. Pohon ini juga memiliki akar yang kokoh, sehingga ia mandiri dan dapat

menjaga sumber air. Oleh karena itu, pohon aren merupakan salah satu pohon yang sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Pohon aren juga merupakan pohon dengan 1.000 manfaat. Betapa tidak, mulai dari akar, batang, daun, dan buahnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Batangnya yang kuat dapat dijadikan kayu bagi aneka bangunan, termasuk rumah masyarakat. Daunnya juga dapat dijadikan peneduh lingkungan dan atap rumah. Daunnya juga dimanfaatkan untuk pembungkus makanan.

Belum lagi buah aren yang legit dapat dikonsumsi langsung menjadi cemilan yang sehat, atau dijadikan obat. Air buahnya yang menyegarkan juga mengandung mineral yang baik bagi tubuh.

Tidak ada bagian dari pohon aren yang tidak berguna. Semuanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan filosofi yang demikian, saya menamai program yang saya inisiasi di Bangka Belitung dengan “Gule Kabung” yang juga kependekan dari Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung.

Saya berharap program ini dapat dikerjakan dengan pendekatan kolaboratif, lintas-instansi, lintas organisasi, dan melibatkan semua pihak terkait. Seperti halnya pohon aren, saya menginginkan program Gule Kabung ini berdampingan dengan program-program lain yang digagas oleh instansi lainnya.

Artinya, keberadaan program ini justru menjadi akselerator bagi jalannya program dari berbagai instansi. Fungsi koordinatif dan kolaboratif yang dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung menjadi pemicu orkestrasi kebijakan lintas-instansi, lintas-desk, dan lintas-organisasi.

Sebagai contoh, dalam penanganan stunting, program Gule Kabung tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, maupun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Bangka Belitung. Pihak lain, seperti dinas-dinas di kabupaten/kota, kepolisian, TNI, anggota legislatif, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga dilibatkan.

Dengan demikian, ketika ditemui kendala di lapangan, antar-instansi dapat langsung berkoordinasi dan mengambil eksekusi solusi yang dapat berdampak bagi masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini juga mengoptimalkan penggunaan anggaran, karena dana dapat diambilkan dari pos anggaran setiap instansi, dan tidak terbatas dari instansi tertentu.

Saya berharap siapa pun yang meneruskan estafet kepemimpinan di Bangka Belitung dapat meneruskan pola kepemimpinan yang sama. Kendati mungkin nama program berubah atau nomenklturnya tidak lagi sama, saya berharap praktik serupa ini dapat diteruskan.

Sebagai bagian dari sumbangan saya untuk masyarakat Bangka Belitung, saya menyambut baik penerbitan buku ini. Kiranya buku ini dapat menjadi rujukan yang berharga dalam praktik-praktik good governance di Tanah Air.

Kendati demikian, saya mengakui program ini pasti memiliki kekurangan dan perlu dievaluasi. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati saya berdoa semoga sidang pembaca mendapatkan sisi-sisi positif untuk dipetik, dan meninggalkan sisi-sisi negatif yang mungkin muncul dari praktik kepemimpinan ini.

Kiranya Tuhan YME memudahkan langkah kita semua dalam berbakti dan bersumbangsiah bagi Ibu Pertiwi. Terima kasih.



Bab I

Pendahuluan

Selayang Pandang Bangka Belitung

Bangka Belitung di Era Kerajaan

SESUAI DENGAN namanya, provinsi yang terletak di bagian timur Sumatra ini terdiri dari dua pulau besar, yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kedua pulau itu dipisahkan oleh Selat Gaspar. Selain dua pulau besar itu, ada ratusan pulau-pulau kecil lainnya di Kepulauan Bangka Belitung. Namun, sebagian besar dari pulau-pulau itu belum berpenghuni. Dari sekitar 470 pulau yang telah memiliki nama di kepulauan itu, baru sekitar 50 pulau yang dihuni.

Secara umum, Kepulauan Bangka Belitung atau yang kerap disingkat dengan Babel, memiliki topografi yang beragam, baik berupa dataran rendah maupun wilayah perbukitan. Kepulauan ini juga memiliki daerah bertopografi rawa-rawa. Pohon bakau menghiasi kawasan rawa-rawa dan pesisir pantai. Pohon bakau

itu mewarnai pantai-pantai indah di gugusan kepulauan yang berpasir putih dengan hamparan batu granit.

Posisinya yang strategis menjadikan Babel sebagai salah satu kawasan penghubung di Nusantara. Dengan daratan Pulau Sumatra, gugusan kepulauan ini dipisahkan oleh Selat Bangka di bagian barat. Adapun di wilayah timur berbatasan dengan Selat Karimata. Di selatan, ada Laut Jawa, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna yang terhubung langsung dengan Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan. Praktis, gugusan Kepulauan Bangka Belitung berada di tengah-tengah kawasan negara Asia Pasifik dan Asia Tenggara.

Dalam artikel berjudul “Asal usul, Sejarah, Kerajaan, Zaman Kolonialisme, dan Kehidupan Masyarakat di Negeri Bangka-

Belitung” yang diunggah oleh Universitas Bangka Belitung dalam lamannya, wilayah kepulauan ini disebut sebagai salah satu bagian dari wilayah perairan Sumatra yang menjadi pusat perdagangan dunia sejak masa lampau. Kesatuan wilayah itu meliputi kawasan Selat Malaka dan Laut China Selatan. Di dalam wilayah itu terdapat Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau-Lingga.

Sejak dulu, Perairan Sumatra berfungsi sebagai hub atau titik penghubung antara negeri di atas angin, yakni sub-benua India, Persia dan Arab, dengan negeri di bawah angin, yaitu Nusantara dan Asia Timur (Cina).

Gambar 1.1 Peta Provinsi Bangka Belitung

Sumber: Babelprov.go.id



Kawasan Bangka Belitung sendiri diperkirakan telah dihuni sejak abad ke-7 masehi. Penguasa kepulauan pun silih berganti, baik dari kerajaan di kawasan Nusantara maupun gerombolan bajak laut. Kerajaan yang pernah menguasai Bangka Belitung antara lain Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Johor, Mataram, dan Kesultanan Palembang. Di era kolonialisme, Bangka Belitung juga pernah dikuasai oleh Belanda dan Inggris.

Ikatan sejarah yang erat antara Bangka Belitung dengan Sriwijaya dan Palembang ini salah satunya yang menjadi dasar gugusan Kepulauan Bangka Belitung di era kemerdekaan menjadi bagian dari Sumatra Selatan. Pada 21 November 2000, Kepulauan Bangka Belitung baru menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Sumatra Selatan.

Penguasaan Sriwijaya terhadap Bangka Belitung terungkap dari peninggalan arkeologis berupa prasasti di dekat Sungai Mendo, Dusun Kota Kapur, Desa Pernagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, pada Desember 1892. Prasasti yang dinamai Prasasti Kota Kapur itu berisikan kutukan kepada mereka yang tidak taat kepada Raja Sriwijaya. Prasasti ini menunjukkan Bangka Belitung ada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya.

Bajak laut juga pernah menguasai kawasan Bangka Belitung. Sekitar abad ke-15, Sultan Johor dan sekutunya Raja Alam Harimau Garang pernah menyerang Bangka untuk membasmi bajak laut. Kerajaan itu juga menyebarkan agama Islam di Bangka Belitung yang sebelumnya dikuasai kerajaan Hindu-Buddha, seperti Sriwijaya dan Majapahit.

Keberadaan bajak laut di perlintasan penting perdagangan laut dunia ini sangat mengganggu. Bahkan, Kesultanan Banten juga pernah mengirim pasukan di bawah pimpinan Bupati Nusantara untuk menyerang gerombolan bajak laut di perairan Bangka Belitung. Untuk sementara, Bupati Nusantara berhasil menguasai Bangka dan memerintah dengan gelar Raja Muda.

Setelah Raja Muda wafat, kekuasaannya diwariskan kepada putri tunggalnya. Putri itu menikah dengan Sultan Palembang, Abdurrahman (1659-1707). Hubungan perkawinan itu membuat kedua kerajaan bersatu. Bangka pun menjadi bagian dari Kesultanan Palembang.

Timah dan Berakhirnya Era Kerajaan

Sekitar 1709, timah ditemukan di Pulau Bangka. Mulanya, penambangan dilakukan oleh orang-orang Johor di Sungai Olin, Toboali. Hanya selang setahun, pada 1710, Bangka sudah menjadi sumber timah yang terkenal di seluruh dunia. Pedagang dan petambang timah berdatangan ke Bangka.

Pada 1717, mulai diadakan hubungan niaga dengan VOC untuk penjualan timah. Sultan Palembang meminta bantuan VOC untuk membasmi bajak laut dan mencegah penyelundupan timah. Sebagai gantinya, pemerintah kolonial Belanda mengirimkan misi dagang ke Palembang yang dipimpin oleh Van Haak.

Pada 1722, VOC mengadakan perjanjian yang mengikat dengan Sultan Palembang, Ratu Anum Kamaruddin, untuk memonopoli perdagangan timah. Isi perjanjian itu ialah hanya membolehkan Sultan Palembang menjual timah kepada VOC, dan VOC boleh membeli timah sesuai dengan jumlah yang mereka perlukan.

Akibat perjanjian yang hanya menguntungkan VOC ini, banyak pihak yang menyelundupkan hasil timahnya ke negeri lain untuk mengejar keuntungan. Di sisi lain, setelah VOC bubar pada 31 Desember 1799, pemerintah Belanda mengirimkan misi dagang lagi pada 1803 yang dipimpin oleh VD Bogarts dan Kapten Lombart.

Namun, situasi sedikit berubah, karena Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811 mensyaratkan penyerahan sejumlah daerah taklukan Belanda kepada Inggris. Daerah-daerah itu antara

lain Jawa, Timor, Makassar, Palembang, dan daerah lainnya. Gubernur Jenderal Inggris Raffles lalu mengirimkan utusan ke Palembang untuk mengambil alih Loji Belanda di Sungai Aur, serta tambang timah di Bangka dan Belitung. Hal ini ditentang oleh Sultan Palembang, Mahmud Badarudin II.

Pada 20 Maret 1812, Raffles kembali mengirimkan ekspedisi ke Palembang yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Rollo Gillespie. Namun, kedatangannya ditolak oleh Sultan Palembang. Inggris lalu melakukan politik pecah belah (*divide et impera*) dengan cara mengangkat Pangeran Adipati Sultan Palembang yang bergelar Sultan Ahmad Najamuddin II, pada 1812.

Politik pecah belah ini membuat Palembang dapat diserahkan kepada Inggris sebagai imbalan atas pengangkatan Sultan Ahmad Najamuddin II. Gillespie pun melenggang dari Palembang ke Batavia dengan kemenangan. Namun, Bangka Belitung hanya dua tahun dikuasai Inggris.

Politik kembali berubah pada 13 Agustus 1814. Belanda dan Inggris menandatangani Perjanjian London. Berdasarkan perjanjian itu, Inggris harus menyerahkan kembali wilayah di Nusantara kepada Belanda, termasuk Bangka Belitung. Penyerahan dilakukan di Mentok, 18 Desember 1816. Belanda diwakili oleh K Heynes, sedangkan Inggris diwakili oleh MH Court.

Pergantian kekuasaan ini tidak banyak berarti bagi nasib Bangka Belitung. Kekayaan alamnya dikuras oleh penjajah. Timah digali besar-besaran tanpa memperhatikan kaum pribumi dan lingkungan. Muncullah perlawanan penduduk terhadap Belanda. Di bawah pimpinan Depati Merawang, Depati Amir, Depati Bahrin, dan Tikal, rakyat Bangka Belitung mengangkat senjata untuk mengusir Belanda dari daerahnya. Namun, upaya itu tidak berhasil.

Ketika terjadi Perang Dunia II, Bangka Belitung dikuasai oleh pasukan Jepang pada 1942-1945. Barulah pada 1949, kepulauan ini resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selaras dengan nafas otonomi daerah, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disahkan. Dengan demikian, sejak 21 November 2000, daerah ini menjadi wilayah otonom yang terpisah dari provinsi induknya, Sumatra Selatan.

Bangka Belitung sebagai “Negeri Serumpun Sebalai” pun terus tumbuh hingga mencapai usia ke-23 pada 2023. “Negeri Serumpun Sebalai” bermakna Kepulauan Bangka Belitung adalah suatu kesatuan komunitas besar yang serumpun atau seperjuangan di tengah kemajemukan masyarakat dan kekayaan alamnya.

Bangka Belitung dalam Angka

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan III-2023 dibanding triwulan III-2022 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,01 persen. Angka ini melambat dibandingkan capaian triwulan III-2022 yang tumbuh sebesar 4,54 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada 2023 terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang justru mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 17,89 persen, diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 15,80 persen; sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 15,05 persen; serta sektor konstruksi yang tumbuh 13,90 persen.

Menariknya, sumbangan pertambangan dan penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung terlihat melorot. Timah tidak lagi menjadi subsektor yang dominan di Bangka Belitung. Menurut data BPS, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian justru minus 0,46.

Padahal, sejak keran izin pertambangan rakyat dibuka setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan timah semakin masif. Pertambangan merambah juga wilayah yang tidak seharusnya ditambang. Hal itu terjadi di kawasan konservasi Gunung Mangkol (Bangka Tengah) dan Bukit Menumbing (Bangka Barat). Pertambangan menjalar tidak hanya di darat, tetapi juga ke laut, termasuk di wilayah tangkapan nelayan.

Turunnya ekspor timah membuat sumbangan dari sektor pertambangan dan penggalian kecil bagi Bangka Belitung. Hal ini juga menandakan timah yang telah ditambah sejak tiga abad lalu di Bangka Belitung tidak lagi menjanjikan prospek ekonomi yang baik. Bagaimana pun timah adalah hasil alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaan atau pertambangannya memiliki batas waktu (*lifetime*) tertentu.

Berdasarkan data PT Timah Tbk, sejak 2016 hingga 2021, sektor pertambangan dan pengolahan timah masih menjadi sektor dominan dalam pembentukan produk domestik regional bruto di Babel dengan kisaran 27-33 persen. Bagi warga, timah adalah jalan untuk meraih pendapatan karena relatif mudah didapatkan dan harga jualnya masih tinggi (Kompas, 21/11/2023).

Namun, pada 2023, gambaran itu mulai berubah. Bangka Belitung harus mulai mencari sumber pendapatan daerah lainnya untuk mengungkit perekonomian di luar tambang timah. Belitung, misalnya, kini mulai berbenah dengan menawarkan destinasi wisata pantai-pantainya yang indah.

Sementara itu, dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM), Kepulauan Bangka Belitung stabil mencatatkan angka yang baik. Tahun 2023, IPM Bangka Belitung mencapai 74,09, meningkat 0,59 poin (0,80 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,50). Selama 2020–2023, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata meningkat sebesar 0,62 persen per tahun.

Pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata meningkat sebesar 0,62 persen per tahun, dari 72,74 pada tahun 2020 menjadi 74,09 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 0,80 persen.

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan. Tiga indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu umur harapan hidup (UHH) sebesar 0,30 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,29 persen, Harapan lama sekolah (HLS) sebesar 1,07 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,08 persen dan rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 1,73 persen dibanding tahun sebelumnya 0,37 persen. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita pertumbuhannya sedikit melambat dari 4,20 persen menjadi 1,73 persen.

Bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 73,39 tahun atau sekitar 73 tahun 4 bulan 20 hari. Peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun ikut berpengaruh meningkatkan harapan hidup bayi. Pada tahun 2023, harapan hidup bayi yang baru lahir bertambah menjadi 73,90 tahun atau sekitar 73 tahun 10 bulan 24 hari.

Hal lain yang berpengaruh pada IPM ialah dimensi pengetahuan. Dimensi ini dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun di Bangka Belitung. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat 0,26 tahun atau 3 bulan

4 hari, sementara RLS meningkat 0,19 tahun atau 2 bulan 8 hari. Secara rata-rata, HLS tumbuh 0,72 tahun per tahun dan RLS tumbuh 0,78 persen per tahun.

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp13,59 juta per tahun. Capaian ini meningkat 231 ribu rupiah (1,73 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 2,20 persen per tahun.

Program Gule Kabung

Memasuki usia ke-23, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak lagi melalui jalur birokrasi yang rumit, kini jalan tembus berupaya dibangun, sehingga kendala pelayanan publik yang dialami warga di lapangan dapat langsung diatasi.

Melalui program yang dinamai “Gule Kabung”, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung di pelosok desa dan wilayah kepulauan. “Gule Kabung” adalah akronim dari Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung. Sesuai dengan kepanjangannya, program ini dicanangkan oleh Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu untuk dapat langsung mengetahui persoalan di lapangan dan sebisa mungkin mengeksekusi penyelesaiannya.

Dalam menjalankan program ini, Penjabat Gubernur didampingi oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hingga anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah untuk terjun ke desa-desa, menginap di rumah warga di kabupaten/kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.



Gambar 1.2
Filosofi Gule Kabung

Pertanyaan, diskusi, dan gugatan pun dikemukakan warga dengan lantang. Sebaliknya, ini menjadi momentum juga bagi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk meluaskan jangkauan tangannya meraih persoalan-persoalan yang dihadapi warga, menjawab keresahan warga, sekaligus menyajikan berbagai solusi sebagai wujud tindak lanjut dari aspirasi yang diterima tersebut.

Oleh karena itu, dalam perjalanan program ini, sejumlah kendala yang beberapa bahkan belum diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diungkapkan oleh warga dan langsung tangani. Persoalan tengkes (stunting), penanganan orang dengan gangguan jiwa, hingga ketertiban masyarakat, menjadi beberapa menu program Gule Kabung ini.

“Semua pihak dilibatkan dan diajak turut serta dalam program ini. Selama ini, yang memiliki warga adalah kota/kabupaten, tetapi dengan program ini, kolaborasi semua pihak bisa dioptimalkan, sehingga persoalan warga di lapangan dapat langsung dijawab dan ditangani,” demikian Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu menggambarkan semangat kolaborasi yang diusung “Gule Kabung”.

Nama program yang dipilih, yakni Gule Kabung, sejatinya memiliki filosofi yang dalam. Gule Kabung adalah pohon aren atau nira. Pohon ini dapat tumbuh bersama semua jenis tanaman lainnya. Artinya, dapat berteman atau bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Pohon aren dapat tumbuh di mana saja, dan dengan kokoh menggunakan akar tunggangnya sendiri. Artinya, pohon aren bisa mendapatkan sumber air tanahnya sendiri dan aren menjadi tanaman yang ramah lingkungan serta menjaga alam di manapun ia berada.

Tidak hanya itu, seluruh bagian dari pohon aren dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Daunnya dapat dijadikan atap. Buahnya dapat dijadikan gula dan makanan. Pohonnya dapat dijadikan kayu untuk membangun rumah. Aren juga dapat dijadikan obat. Tidak ada bagian dari pohon aren yang terbuang sia-sia. Hal ini melambangkan Gule Kabung sebagai pohon yang bermanfaat. Demikian juga harapan itu melekat dalam program “Gule Kabung” yang digagas Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.

Pohon aren sudah dikelola sejak masa Sriwijaya (tercatat di Prasasti Talang Tuo) sehingga aren juga menjadi sumber peng-

hasilan sejak dulu bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia termasuk di Kepulauan Bangka Belitung.

Berbagai filosofi yang dikandung oleh pohon aren itu menjadi dasar filosofis bagi program Gule Kabung. Program ini diharapkan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bangka Belitung. Kerja kolaborasi, keterbukaan, dan kesediaan mendengar serta menghadirkan solusi menjadi kunci keberhasilan.

Dalam pelaksanaannya, program ini tidak harus menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendaan dan eksekusi tindakannya dapat bersumber dari berbagai anggaran instansi yang terlibat. Sebagai contoh, dalam penanganan stunting di suatu kabupaten/kota, dananya dapat bersumber dari dinas terkait, maupun dari instansi Polri yang kebetulan diajak bekerja sama. Sebab, anggaran stunting kini melekat di hampir semua instansi lantaran penanganan persoalan ini menjadi program nasional.

Gule Kabung berfokus pada penanganan empat persoalan utama, yakni stunting atau tengkes, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, dan program inovatif lainnya. Keempat persoalan itu didekati dengan cara sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah kabupaten/kota setempat.

Selama ini, ada kesan pemprov tidak memiliki kekuatan dalam mengeksekusi sebuah program di lapangan lantaran provinsi tidak “memiliki” rakyat atau penduduk. Penduduk terkait langsung dengan pemerintah kabupaten/kota. Peran provinsi sebatas koordinasi dan supervisi. Kondisi ini mengecilkan peran provinsi selaku representasi negara atau pemerintahan di daerah. Dengan peran dan fungsi yang sifatnya koordinatif, program Gule Kabung dapat pula dinilai memenuhi unsur-unsur pemerintahan yang baik, sepanjang itu dilakukan dengan konsep kolaborasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 1.3 Pj Gubernur Bangka Belitung menerima penghargaan Indonesia Award 2023 dari INews untuk program Gule Kabung

Sumber: Diskominfo/Nabila

Dalam beberapa kali kesempatan, Suganda mengatakan, program ini berakar dari prinsip-prinsip *good governance*, yang di dalamnya meliputi juga asas transparansi, sinergitas antar-lembaga atau instansi, akuntabel, dan menyasar langsung persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan fungsinya sebagai administrator, fasilitator, sekaligus eksekutor kebijakan.

“Salah satu contohnya, saat sedang marak di media ada anak putus sekolah karena harus membantu orangtuanya, dan orangtuanya tidak mampu, saya langsung menghubungi jaringan yang bisa saya hubungi. Itu ternyata langsung direspons. Anak itu bisa dibiayai. Artinya, ini tidak hanya bisa diatasi dengan anggaran APBD, tetapi siapa pun bisa tergerak hatinya,” kata Suganda menggambarkan bagaimana program ini dijalankan.

Di luar empat program utama yang disasar dalam Gule Kabung, ada persoalan-persoalan lain yang juga berusaha diatasi dan dieksekusi dengan program ini. Acap kali persoalan itu bersifat sangat teknis dan khusus, sehingga tidak ditemui di daerah lain. Contohnya, saat pembahasan mengenai jalan yang menembus hutan di Belitung Timur. Mulanya pemda setempat tidak menemukan cara untuk mewujudkan jalan yang menembus hutan itu. Namun, dengan diskusi intens melalui Gule Kabung, menurut Suganda, persoalan itu dapat diselesaikan.

Kerap kali problem komunikasi menjadi hambatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, dengan turun ke lapangan langsung dan berjalanan tangan dengan instansi terkait yang sehari-harinya menangani persoalan itu, peran koordinatif provinsi dapat lebih berjalan dan direalisasikan langsung.

Tidak hanya itu, provinsi juga dapat mendengar langsung masukan dan keluhan dari masyarakat terkait berbagai persoalan. Mulai dari keluarga yang anaknya dipasung, kemiskinan, pembuatan KTP, kesulitan air, hingga pembagian bantuan sosial (bansos), semua ditampung untuk dicarikan solusinya saat itu juga, atau setidaknya berusah dituntaskan dalam waktu yang tidak lama.

Sebagai sebuah pendekatan dan konsep praktis dalam kerja-kerja pemerintahan, Gule Kabung dapat diterapkan dengan berbagai nama lain. Instansi yang dilibatkan dapat juga berubah. Namun, cara dan pendekatan yang dilakukan boleh jadi tetap relevan di daerah mana pun atau dalam menghadapi persoalan apa pun.

“Sebagai sebuah upaya, saya berharap program ini dapat diteruskan oleh gubernur atau penjabat guberur selanjutnya. Yang pasti, konsep ini berusaha saya terapkan di Bangka Belitung dan semoga dapat menjadi *legacy* yang baik,” ucap Suganda.

Manifestasi Good Governance

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain menyangkut pelaksanaan yang lebih akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat hukum, inovatif, efisien, dan efektif. Secara menyeluruh, Bappenas menyebut 14 prinsip dasar *good governance* sebagai berikut.

1. Wawasan ke Depan (*visionary*);
2. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*);
3. Partisipasi Masyarakat (*participation*);
4. Tanggung Gugat (*accountability*);
5. Supremasi Hukum (*rul of law*);
6. Demokrasi (*democracy*);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (*profesionalism and competency*);
8. Daya Tanggap (*responsiveness*);
9. Keefisienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
10. Desentralisasi (*decentralization*);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*private sector and civil society partnership*);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*commitment to reduce inequality*);
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environmental protection*);
14. Komitmen Pasar yang Fair (*commitment to fair market*).

Poin-poin tersebut disarikan dari pandangan pokok tentang *good governance*. Adapun konsep *good governance* tidak berasal dari satu teori sosial tertentu, tetapi merupakan hasil dari

perkembangan pemikiran di berbagai bidang seperti ilmu politik, ekonomi, dan administrasi publik. Teoritikus yang gagasannya dijadikan pondasi *good governance* antara lain Friedrich Hayek yang mengemukakan tentang pemerintahan terbatas dan kebebasan individu; Max Weber tentang birokrasi dan rasionalisasi administrasi publik; John Rawls soal pentingnya keadilan sosial dan distributif dalam pengambilan keputusan publik; Amartya Sen tentang pembangunan manusia dan kemiskinan; Robert Dahl: mengenai demokrasi dan pembangunan politik; Mary Parker Follett tentang manajemen yang demokratis dan partisipatif; dan Francis Fukuyama yang menegaskan pentingnya lembaga dan peraturan yang kuat dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Gule Kabung, rasanya menarik jika melihat gagasan Amartya Sen lantaran dia tumbuh dan besar dalam lingkungan yang mirip dengan kondisi Indonesia secara umum, terutama jika dikaitkan dengan gagasan Gule Kabung.

Amartya Sen lahir pada tahun 1933 di Bengal, India. Dia mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Kolkata dan melanjutkan pendidikannya di luar negeri, memperoleh gelar doktor dari Universitas Cambridge di Inggris. Dia kemudian mengajar di berbagai universitas terkemuka di seluruh dunia, termasuk Universitas Harvard di Amerika Serikat. Pengalamannya sebagai seorang akademisi dan pengamat di berbagai negara dan budaya memberinya wawasan mendalam tentang berbagai aspek pembangunan manusia.

Amartya Sen telah melakukan penelitian di lapangan tentang berbagai isu sosial dan ekonomi di berbagai negara, termasuk di India, Bangladesh, dan negara-negara Afrika. Pengalaman ini memberinya pemahaman langsung tentang tantangan dan peluang dalam upaya pembangunan manusia di seluruh dunia. Amartya Sen kemudian mengembangkan teori pembangunan

manusia yang menyoroti pentingnya memandang pembangunan dari perspektif kesejahteraan dan kemampuan individu, bukan hanya peningkatan ekonomi atau pertumbuhan materi. Pandangan ini amat relevan dengan gagasan Suganda sebagai pengagas program Gule Kabung.

Bila disarikan dari beberapa buku Amartya Sen seperti *Development as Freedom* (1999), *The Idea of Justice* (2009), *Identity and Violence: The Illusion of Destiny* (2006), dan *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity* (2005), maka setidaknya kita menemukan lima prinsip dasar *good governance*.

Pertama, Partisipasi Masyarakat. Pemerintahan yang baik harus mendorong partisipasi aktif dari warga negara, termasuk kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Partisipasi ini tidak hanya penting untuk legitimasi kebijakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat tecermin dalam keputusan pemerintah. *Kedua*, Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dari *good governance*. Pemerintah harus beroperasi secara terbuka dan transparan, memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan dan keputusan mereka. Selain itu, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat, dan harus ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa mereka dipertanggungjawabkan atas kinerja mereka.

Ketiga, Perlindungan Hak Asasi Manusia. Ini termasuk hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak atas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Perlindungan hak asasi manusia adalah landasan bagi masyarakat yang adil dan inklusif. *Keempat*, Keadilan Sosial dan Distributif. Pemerintahan yang baik harus bekerja untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dialokasikan secara adil kepada

semua warga negara. *Kelima*, Pemerintahan yang Responsif. Pemerintah harus mendengarkan keluhan dan masukan dari warga negara, dan harus siap untuk menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Bila kita telaah lebih mendetail, praktik Gule Kabung, tidak ada yang meleset dari lima prinsip tersebut. Dengan kata lain, gagasan besar Amartya Sen telah diejawantahkan menjadi gerakan yang membumi oleh Suganda selama penjadi pejabat Gubernur Bangka Belitung.

Gule Kabung juga amat sesuai dengan konsep Open Society. Teori Open Society pertama kali dikemukakan oleh filsuf dan ekonom terkenal bernama Karl Popper dalam bukunya yang berjudul *The Open Society and Its Enemies* (1945). Secara umum, teori Open Society menyatakan, masyarakat yang bebas, inklusif, dan terbuka akan menjadi benteng terbaik melawan tirani, dogmatisme, dan ketidakadilan. Dalam sebuah masyarakat terbuka, individu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengkritik pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut represi atau pembatasan yang berlebihan. Praktik-praktik Gule Kabung klop sekali dengan pengertian di atas.

Open Society dibangun atas lima prinsip. *Pertama*, keterbukaan. Masyarakat harus terbuka terhadap berbagai pandangan, ideologi, dan kepercayaan tanpa diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok minoritas. *Kedua*, kehendak untuk Berubah. Masyarakat harus terbuka terhadap perubahan dan kemajuan, serta bersedia mengakui kesalahan dan melakukan koreksi. *Ketiga*, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Individu memiliki kebebasan untuk bertindak, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Keempat, perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap

diskriminasi. *Kelima*, demokrasi yang kuat. Maksudnya, kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan terdapat mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam teori Open Society, Popper juga mengkritik “masyarakat tertutup”, yakni ketika kekuasaan dipegang oleh elite yang otoriter dan dogmatis. Ini yang dilawan Suganda dalam praktik Gule Kabung yang digagas Suganda. Ia sebagaimana Popper menekankan pentingnya debat terbuka, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan perlindungan terhadap kebebasan individu sebagai fondasi dari masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Namun, menarik pula untuk dicermati praktik-praktik *good governance* yang berusaha diterjemahkan oleh Suganda ke dalam Gule Kabung pada dasarnya tidak lepas dari akar budaya dan kontekstualitas masyarakat. Dari pemilihan nama “Gule Kabung” yang berarti gula aren, mengindikasikan elaborasi antara prinsip-prinsip *good governance* dengan watak lokal yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Hal ini boleh jadi menghasilkan praktik lapangan mengenai *good governance* yang khas Bangka Belitung, atau setidaknya menampakkan ciri keindonesiaan yang kental.

Sebagai sebuah prinsip umum yang sifatnya universal, *good governance* dalam wajah “Gule Kabung” menjadi aktivitas tata laksana pemerintahan yang membumi dan karenanya dapat diterima dalam praksis maupun praktik oleh masyarakat sekitar. Penerimaan yang baik atas suatu program dan kebijakan pemerintah berdampak positif pada operasionalisasi program itu di lapangan. Potensi keberhasilan program juga akan lebih besar manakala masyarakat dapat memahami dan menerima konsep tersebut.

Karakter sinergitas dan kolaborasi yang menonjol dalam Gule Kabung, sejatinya telah menjadi jati diri masyarakat Indonesia secara umum, yang dengan istilah lain dikenal dengan gotong

royong. Prinsip-prinsip kebersamaan ini ketika diterapkan ke dalam praktik tata kelola pemerintahan ternyata dapat bersenyawa dan menghasilkan respons positif dari publik.

Di sini terlihat kemampuan Gule Kabung menerjemahkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ke dalam pola-pola kearifan lokal yang lebih dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak berkepentingan.

Gule Kabung sebagai sebuah praktik dapatlah dikatakan sebagai bentuk *good governance* ala Bangka Belitung, dan program ini setidaknya dapat menjadi contoh *good governance* ala Indonesia yang boleh jadi dikembangkan di tempat lain. Namun, tidak tertutup kemungkinan praktik-praktik *good governance* lainnya dengan ciri khas khusus dan khas dikembangkan oleh daerah lain.

Di sisi lain, praktik kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Suganda dengan turun langsung ke lapangan menunjukkan bagaimana pentingnya pemimpin hadir melayani publik secara langsung. Kendati di satu sisi dapat pula dilihat ini sebagai bentuk kecerdasan Suganda melihat bias patronase kepemimpinan di kalangan masyarakat. Ketika pimpinan turun, bawahan sudah pasti akan turun, artinya semua sistem bagian birokrasi itu bergerak ke arah yang sama. Hal itu, misalnya, terlihat dengan hadirnya bupati/walikota dan kepala dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota dalam kegiatan Gule Kabung. Mereka akan turun mengikuti langkah gubernur dan menyukseskan programnya.

Suganda “mengakali” bias patronase kepemimpinan itu dengan cerdas, sehingga hal itu bukan menjadi kelemahan, tetapi justru menjadi katalisator bagi pelayanan publik.

Kendati demikian, praktik *good governance* melalui Gule Kabung ini patut untuk terus dikaji dan dikembangkan melalui berbagai evaluasi. Harapannya agar semangat tata kelola pemerintahan ini dapat lebih baik dan menjadi contoh nyata *good governance* ala Bangka Belitung.



Bab II

Merenda Generasi Emas Babel

Menurunkan Prevalensi Stunting

PENANGANAN TENGKES atau stunting menjadi salah satu program utama dalam pelaksanaan Gule Kabung. Penanganan gangguan tumbuh kembang anak ini menjadi perhatian karena Provinsi Bangka Belitung rupanya memiliki pekerjaan rumah cukup berat terkait persoalan ini.

Hasil dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis pada 2023 menunjukkan, Provinsi Bangka Belitung memiliki angka prevalensi stunting yang cukup tinggi, yakni 18,5 persen. Angka itu hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 18,6 persen (2021).

Angka prevalensi stunting di setiap kabupaten/kota di Bangka Belitung di atas 12 persen. Bahkan, beberapa di antaranya lebih tinggi dari angka prevalensi nasional, yakni 21,6 persen. Kabupaten dengan angka prevalensi tertinggi di Bangka Belitung adalah Bangka Selatan sebesar 23 persen, yang kemudian diikuti

oleh Bangka Tengah dengan 21,2 persen. Selanjutnya, Bangka Barat dengan 20,5 persen, Belitung sebesar 19,6 persen, Bangka dengan 16,2 persen, Belitung Timur sebesar 16 persen, dan Kota Pangkalpinang sebesar 12,9 persen.

Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan memasukkan penanganan stunting sebagai salah satu target dalam program Gule Kabung. Eksekusi langsung oleh pemerintahan provinsi atas kasus ini diharapkan turut menyumbang percepatan penanganan problem gizi anak ini.

“Dalam penanganan stunting sebenarnya hanya melibatkan berbagai instansi atau badan yang terlibat, sebab ini merupakan program nasional. Semua instansi memiliki anggaran untuk menangani stunting, sehingga optimalisasi anggaran lintas sektoral itu bisa dilakukan,” ucapnya.

Dalam setiap kesempatan turun ke lapangan dalam program Gule Kabung, pertemuan dengan anak-anak yang berpotensi mengalami gizi buruk maupun yang telah mengalami stunting menjadi perhatian. Institusi terkait seperti dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), dan dinas sosial provinsi maupun kabupaten/kota, bertemu untuk memberikan solusi.

Bahkan, institusi penegak hukum, seperti kepolisian juga dilibatkan. Sebagai program nasional, semua institusi memiliki program penanganan stunting, termasuk kepolisian.

“Dengan anggaran yang sudah tersedia di setiap institusi, tidak diperlukan penganggaran khusus lagi dari provinsi dalam penanganan stunting. Fungsi kolaboratif yang dikedepankan, karena setiap institusi dapat urun tangan,” ucapnya.

Upaya mengatasi stunting tidaklah instan. Pertemuan di lapangan melalui Gule Kabung adalah pemicu dan akselerator program. Namun, ujung tombak keberhasilan di lapangan adalah upaya pencegahan dan pemantauan yang intensif dan rutin.

Perjumpaan dengan masyarakat dan pemantauan, terutama kelompok ibu dan remaja putri menjadi hulu dari pengentasan masalah stunting. Pencegahan menjadi krusial lantaran stunting dipicu bukan oleh satu atau dua faktor saja, melainkan multi-faktor yang kompleks. Salah satu faktor, misalnya, terkait dengan mentalitas dan kesiapan remaja putri dalam menghadapi kehamilan maupun rencana kelahiran.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Bangka Belitung Hastuti mengakui, penanganan stunting mengacu kepada banyak indikator dan menasar multifaktor yang tidak semuanya terhubung dengan persoalan kesehatan.

“Di lapangan, misalnya, ada kader Posyandu kami yang telah memberikan makanan tambahan, tetapi sang ibu tidak segera menyiapkan untuk anaknya. Rupanya, sang ibu lebih asyik bermain gadget, dan itu berdampak pada pola makan anak,” kata Hastuti.

Persoalan itu bukan merupakan isu kesehatan, melainkan erat dengan problem pola asuh dan kesiapan ibu dalam mendidik anak.

Para remaja putri dengan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan juga berpotensi melahirkan atau membesarkan anak stunting maupun mengalami gizi buruk. Oleh karena itu, pencegahan stunting dimulai jauh-jauh hari, bahkan sebelum kehamilan terjadi.

“Ada yang mungkin belum siap hamil, atau belum cukup puas bermain, sehingga ketika terjadi kehamilan di usia dini, si anak tidak mendapatkan cukup perhatian. Bahkan, kelahiran anak menjadi beban. Pada situasi ini, isu stunting tidak melulu berkaitan dengan problem kesehatan,” ungkap Hastuti.

Di Bangka Belitung, anak-anak yang lahir di keluarga dengan perokok aktif juga berpotensi lebih besar mengalami stunting. Bahkan, di antara keluarga yang cukup mapan secara ekonomi, risiko anak stunting besar karena faktor pola asuh dan pola makan yang tidak tepat.



Gambar 2.1 Kunjungan program Gule Kabung dalam upaya penanganan stunting.
Sumber: Diskominfo/Babel

Sebagai contoh, ketika ibu bekerja, sang anak ditinggal bersama dengan asisten rumah tangga atau nenek. Hal itu membuat gizi bagi si kecil tidak sepenuhnya terjamin, karena asisten atau nenek di rumah mungkin memiliki pola asuh yang kurang tepat.

Ada pula faktor lain yang memicu kurang baiknya penyerapan gizi anak dari sisi kesehatan. misalnya, karena anak cacangan, atau menderita tuberkulosis (TBC).

Sejak dari hulu, pencegahan stunting di Bangka Belitung dilakukan dengan berbagai upaya, termasuk pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, sampai dengan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Tujuannya ialah mencegah remaja putri dan calon pengantin mengalami anemia.

Setelah menikah dan hamil, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk memastikan perkembangan kehamilan berjalan normal. Ibu hamil juga diberi tablet penambah darah selama 90 hari kehamilan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan kepada ibu hamil untuk memastikan sang ibu tidak mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, petugas kesehatan akan memberikan makanan tambahan.

Di masa kehamilan, petugas kesehatan juga menyelenggarakan kelas-kelas kehamilan untuk memberikan edukasi mengenai pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif. “Kami mendorong ibu-ibu yang memasuki masa nifas agar bisa memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Setelah enam bulan, balita wajib diberikan makanan pendamping ASI,” ucap Hastuti.

Hal lain yang tak kalah penting ialah pemantauan di masa tumbuh kembang anak. Balita perlu rutin ditimbang dan diukur tinggi badannya. Dengan demikian, perkembangan fisik anak terpantau sesuai dengan kurva pertumbuhan.

Pemantauan fisik anak atau balita, menurut Hastuti, kerap dilupakan. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu stunting yang tidak



Gambar 2.2 Kegiatan kunjungan dan pembinaan ke rumah lokus stunting di Desa Lubuk Pabrik.

Foto: Prayogi Januardi | Sumber: Bangkatengahkab.id

diketahui. Anak-anak di bawah usia 2 tahun yang mengalami gizi buruk maupun gangguan tumbuh kembang masih dapat diperbaiki. Namun, bagi anak-anak yang tidak terpantau gangguan tumbuh kembangnya, situasi ini berpotensi tidak dapat diatasi sejak dini.

Mengandalkan Kolaborasi

Gule Kabung sebagai sebuah program dinilai berhasil mengakselerasi penanganan stunting. Kehadiran pejabat gubernur yang mendatangi rumah warga dengan anak stunting menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam mengatasi persoalan ini. Bantuan langsung diberikan kepada keluarga anak tersebut, baik berupa makanan tambahan maupun bantuan sosial.

Pemberian makanan tambahan (PMT) dilakukan oleh puskesmas setempat kepada anak-anak yang terindikasi mengalami stunting atau pun gizi buruk. Dana bagi PMT itu disalurkan langsung oleh Kementerian Kesehatan kepada puskesmas, dan diberikan kepada anak-anak yang menjadi sasaran.

“Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk menyelenggarakan Posyandu, dan bagaimana agar kesehatan anak-anak itu dipantau rutin,” kata Hastuti.

Pemantauan pertumbuhan anak itu penting karena kader-kader Posyandu tidak selalu memiliki itu cukup sumber daya untuk mendatangi rumah anak satu per satu. Kerja sama dan kesadaran dari orangtua anak sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang anak termonitor.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai instansi lainnya juga diperlukan untuk mengatasi stunting. Dinkes sendiri tidak mampu untuk mengatasi dan mencegah stunting. Program-program lain dari berbagai instansi penting diterapkan untuk menurunkan angka prevalensi stunting nasional hingga 14 persen pada 2024.

Hastuti mengatakan, di sinilah letak peran penting Gule Kabung, yakni sebagai program yang bersifat koordinatif dan kolaboratif dalam mengatasi persoalan stunting. “Kami berkoordinasi dengan dinkes kabupaten/kota dan puskesmas setempat di mana anak dengan stunting itu berada. Sejauh ini, program Gule Kabung itu praktis tidak menemui kendala,” ucapnya.

Ketika pejabat gubernur turun ke lapangan atau ke rumah anak stunting, instansi lainnya langsung merespons dengan berbagai kebijakan. Keberlanjutan program ini diharapkan benar-benar bisa mewujudkan generasi emas Bangka Belitung.

Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan memasukkan penanganan stunting sebagai salah satu target dalam program Gule Kabung. Eksekusi langsung oleh pemerintahan provinsi atas kasus ini diharapkan turut menyumbang percepatan penanganan problem gizi anak ini.



Bab III

Menolong Si Miskin

DIKENAL SEBAGAI daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, Provinsi Bangka Belitung masih terlitit persoalan kemiskinan ekstrem. Data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bangka Belitung menyebutkan, sebanyak 8.044 warga yang termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

Untuk mengejar target “zero” atau nol kemiskinan ekstrem seluruh wilayah Indonesia pada 2024, Bangka Belitung harus bekerja keras. Pada Oktober sampai Desember 2023, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin ekstrem melalui PT Pos. Setiap warga yang masuk kategori miskin ekstrem diberi bantuan Rp350.000 per bulan.

Dengan perhitungan bansos dari Oktober-Desember 2023, Bangka Belitung mencairkan sedikitnya Rp8 miliar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Dana itu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.

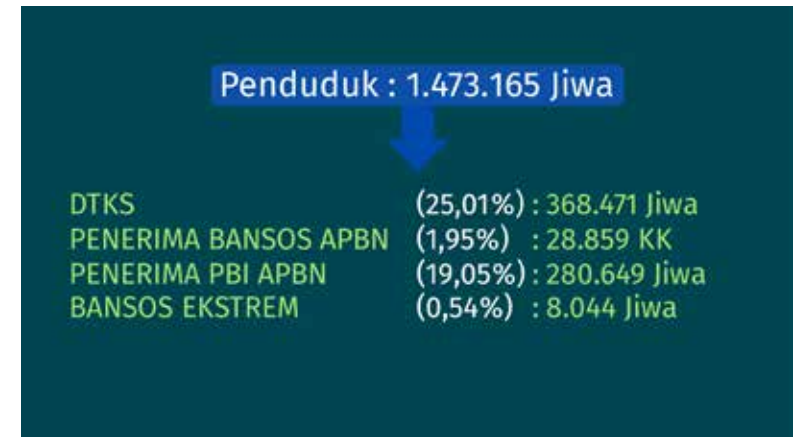
“Hal itu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2023 karena mau dievaluasi di awal tahun. Target kita di awal tahun ini kemiskinan ekstrem di bawah 30 persen. Strategi pengucuran dana itu dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” kata Budi Utama, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Budi mengatakan, di bawah Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, Pemprov Bangka Belitung menganggarkan khusus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Penanganan kemiskinan ekstrem ini di bawah Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Namun, untuk pendataan dan pembuatan kategori warga yang miskin ekstrem diserahkan kepada setiap daerah kabupaten atau kota.

Setiap daerah memiliki indikator yang berbeda-beda soal kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, warga yang tergolong miskin ekstrem di satu daerah boleh jadi tidak masuk kategori yang sama di daerah lain.



Gambar 3.1 Penyerahan bantuan rehabilitasi sosial di Bangka Tengah



Gambar 3.2 Target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.

Namun, secara umum patokan kemiskinan ekstrem dapat melihat standar dari Bank Dunia (World Bank). Warga disebut miskin ekstrem jika pendapatannya di bawah 1,9 Dollar AS per hari.

Beberapa daerah misalnya, memasukkan indikator kemiskinan ekstrem dengan rantai yang disemen, kualitas MCK atau sanitasi, dan pendapatan minimal sebulan. Sebagai contoh, jika pendapatan per orang minimal Rp350.000 per bulan, dengan perhitungan satu keluarga ada empat orang, maka dalam sebulan ada pemasukan Rp 1,4 juta. Jika pengeluaran belanja kurang dari jumlah itu, warga atau keluarga tersebut dapat digolongkan miskin ekstrem.

Budi mengatakan, pemicu kemiskinan ekstrem di Provinsi Bangka Belitung antara lain minimnya literasi finansial. Di saat harga timah tinggi, pendapatan warga pun umumnya tinggi. Namun, mereka lupa menabung dan menyimpan sebagian pendapatannya. Akibatnya, ketika harga timah anjlok, warga tidak memiliki pendapatan yang memadai.

Situasi ini menjadi ironi, karena pada dasarnya pendapatan rata-rata warga Bangka Belitung lebih tinggi daripada warga daerah lain. Sebagai daerah penghasil timah, pendapatan warga Bangka Belitung cenderung tinggi. Bahkan, warga yang tergolong miskin ekstrem pun memiliki kendaraan roda dua. Parameter atau indikator kepemilikan kendaraan bermotor, misalnya, mungkin tidak ditemui di daerah lain.



Gambar 3.3 Data terpadu kesejahteraan sosial kementerian sosial

“Kalau di Jawa, misalnya, mereka yang tergolong miskin ekstrem mungkin tidak memiliki sepeda motor. Situasi ini berbeda di Bangka Belitung. Warga miskin ekstrem di sini pun memiliki kendaraan bermotor. Hampir setiap rumah di Bangka Belitung memiliki sepeda motor,” kata Budi.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sepanjang 2023 telah diterbitkan dua peraturan daerah (perda) terkait kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dua perda ini mengatur detail mengenai indikator kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan. Selama 23 tahun berdiri, baru ini Provinsi Bangka Belitung memiliki perda khusus yang mengatur soal kemiskinan.

Untuk mengurai akar kemiskinan ekstrem, menurut Budi, harus dilihat dari hulu ke hilir. Bisa bermula dari pendidikan, gaya hidup, hingga pengaturan keuangan, dan pola pikir dalam pengelolaan pendapatan. Pengelolaan keuangan, misalnya, bagi warga yang memiliki pendapatan di luar hasil tambang akan lebih kecil risikonya mengalami kemiskinan ekstrem. Umumnya, warga Bangka Belitung yang bergantung pada hasil tambang juga memiliki usaha lain di bidang perkebunan dan pertanian, misalnya, perkebunan sawit.

Namun, bagi warga yang tidak memiliki pendapatan lain, tambang timah adalah segalanya. Mereka yang paling rentan terjatuh ke dalam kategori miskin ekstrem adalah para penambang rakyat.

Program Gule Kabung, menurut Budi, memiliki daya ungkit luar biasa bagi pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, dengan turun langsung ke lapangan, Penjabat Gubernur Bangka Belitung dapat melihat langsung persoalan kesejahteraan yang dihadapi oleh warga.



Gambar 3.4 Perubahan data kemiskinan ekstrem dari Kepmenko PMK 2022, sampai realisasi penerima bansos 15 Desember 2023, 12.46 WIB

“Pak Gubernur biasanya duduk langsung di rumah warga, dan sampai malam ngobrol membahas berbagai macam persoalan. Di dalam kesempatan itu, ada pula bupati dan kepala dinas terkait, yang bisa langsung memberikan solusi atau mengeksekusi kebijakan bagi warga,” ujarnya.

Tidak jarang, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan sampai malam berbincang dengan warga. “Sampai kopi terakhir habis,” kata Budi.

Selama tujuh bulan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Suganda telah dua putaran mengunjungi tujuh kabupaten/kota se-Bangka Belitung. Artinya, semua daerah telah dikunjungi Suganda, dan masing-masing daerah dua kali dikunjungi. Dalam pertemuan-pertemuan di rumah warga itu, banyak pertanyaan dikemukakan oleh warga, mulai dari persoalan kesejahteraan, lapangan kerja, dan pendidikan, serta isu-isu lainnya.

“Kesannya positif, karena kebutuhan warga dapat langsung ditanggapi. Misalnya, ketika wara membutuhkan kursi roda, hal itu langsung direspons dan ditugaskan kepada dinas setempat. Begitu juga ketika bertemu dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dinkes dan dinkes langsung bergerak,” kata Budi.

Dalam kunjungan Gule Kabung, Suganda tidak hanya mengunjungi satu atau dua titik dalam sehari. Pernah kunjungan dilakukan pada delapan titik sehari. Kunjungan maraton itu pun dapat terus bertambah sesuai perkembangan. Misalnya, rencana awal adalah mengunjungi warga miskin, agenda itu dapat berkembang dengan mengunjungi pantai asuhan, panti sosial, sekolah, dan posyandu.

“Sepanjang tempat-tempat itu terjangkau, Pak PJ Gubernur tidak keberatan untuk mendatangi titik-titik tersebut. Jadi, semangat untuk bertemu warga itu luar biasa, sekalipun tidak ada di dalam jadwal,” ujarnya.

Warga yang ikut bergabung dalam pertemuan Gule Kabung itu pun bukan hanya berasal dari wilayah tertentu saja. Warga di luar daerah juga ikut datang dan bertanya, karena mereka mendengar ada Gubernur Bangka Belitung datang.

Hasil kunjungan Gule Kabung pun, menurut Budi, dibahas dan dimonitor dalam rapat pimpinan (rapim) mingguan untuk ditindaklanjuti.

Suganda mengatakan, selama masa kepemimpinannya, kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama karena hal itu juga merupakan bagian dari program pemerintah pusat. Pemicu kemiskinan ekstrem pun berusaha ditelisik lebih dalam agar dapat direspons dengan lebih baik.

Program Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem



SUMBER DATA

- 1 Data P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK

BANTUAN

- 2 • Rp350.000/bulan
• Oktober, November, Desember 2023
• Rp1.050.000/penerima manfaat

Penerima

- 3 Penerima manfaat yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas sosial dan/atau Bappeda Kabupaten/kota

Dasar Bantuan

- 4 Penetapan hasil verifikasi & validasi ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Walikota

Gambar 3.5 Program bantuan sosial kemiskinan ekstrem



Bab IV

Menjaga Daya Beli Rakyat

Mengendalikan Inflasi

INFLASI YANG tinggi dapat menjadi sumber kekhawatiran bagi pemerintah dan masyarakat karena dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan ekonomi dan sosial. Beberapa alasan mengapa pemerintah takut dengan inflasi dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat antara lain:

1. Daya Beli Menurun: Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli uang. Dengan nilai mata uang yang terus menurun, masyarakat akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama, mengurangi daya beli mereka;
2. Ketidakpastian Ekonomi: Inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bisnis dan konsumen mungkin menjadi enggan berinvestasi atau melakukan pengeluaran jangka panjang jika mereka khawatir nilai uang mereka akan terus berkurang;

3. **Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata:** Inflasi dapat memengaruhi distribusi pendapatan. Masyarakat dengan aset atau pendapatan tetap mungkin lebih rentan terhadap kerugian daya beli dibandingkan dengan mereka yang memiliki aset yang bisa meningkatkan nilainya;
4. **Ketidakstabilan Pasar Keuangan:** Inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar keuangan. Para investor mungkin kesulitan menilai nilai riil dari investasi mereka, dan fluktuasi harga saham dan obligasi bisa menjadi lebih sulit diprediksi;
5. **Biaya Hidup Meningkat:** Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan biaya hidup naik secara keseluruhan, termasuk harga makanan, bahan bakar, dan barang konsumen lainnya. Hal ini dapat memberikan beban ekstra pada kelompok masyarakat yang lebih rentan;
6. **Pentingnya Kredibilitas Moneter:** Pemerintah sering berusaha mempertahankan kredibilitas moneter mereka dengan menjaga inflasi pada tingkat yang dapat diterima. Jika pemerintah dianggap tidak mampu mengelola inflasi, ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada kebijakan ekonomi mereka.

Oleh karena itu, banyak pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi yang tinggi melalui kebijakan moneter, fiskal, dan ekonomi lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, merata, dan berkelanjutan.

Pada September 2023 Inflasi Kepulauan Bangka Belitung naik sebesar 3,55 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun

sebelumnya. Angka inflasi bulan itu juga naik 0,90 dibandingkan bulan sebelumnya. Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel Suganda Pandapotan Pasaribu mengungkapkan hal itu ketika memimpin Rapat Pengendalian Inflasi di Ruang Batu Rakit Rumah Dinas Gubernur, Jumat (6/10/2023).

Penyumbang inflasi tertinggi adalah komoditas beras. Yang merisaukan, angka inflasi tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia. Padahal, pada bulan sebelumnya sejak April hingga Juli 2023, Negeri Serumpun Sebalai termasuk dalam sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi terendah. “Kondisi demikian menjadi fokus perhatian kita bersama, dan perlu penanganan khusus dalam pengendaliannya,” ujar Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu.

Dia kemudian menyusun rencana jangkah pendek untuk menekan angka inflasi. Bentuknya antara lain melakukan operasi pasar (OP), yang telah dilakukan sebanyak 204 kali. Di samping itu, Satgas Pangan akan melakukan sidak, dan akan memastikan harga eceran tertinggi (HET) beras.

Lewat program Gule Kabung, Pejabat Gubernur Suganda Pandapotan menggelar pasar murah.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ahmad Yani menjelaskan, inflasi di Babel itu memang tinggi. Yang utamanya dihitung adalah inflasi di Pangkal Pinang dan Tanjungpandan. Dalam 10-15 tahun terakhir, inflasinya mencapai 15 persen sampai 18 persen. Kemudian terus menurun dan pada akhir tahun 2023 sampai diangka 2,65 persen. “Ini luar biasa,” ujar dia.



Gambar 4.1 Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Gule Kabung untuk menekan inflasi di Desa Badau, Belitung

Ahmad Yani menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung sulit tidak mengalami kenaikan inflasi. Meski demikian, inflasi dapat ditekan antara lain lantaran adanya program Gule Kabung berupa operasi pasar, distribusi komoditas bersubsidi, dan pengendalian harga komoditas tertentu yang menjadi kunci kenaikan inflasi seperti beras, misalnya.

Dia menambahkan, ketika harga beras sangat tinggi di Kabupaten Belitung yang saat itu harganya termasuk tertinggi

di Indonesia, yakni mencapai Rp20.000 per kilogram, tim Gule Kabung menghubungi Bulog. Tujuannya meminta Bulog mendistribusikan secara besar-besaran di Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan dengan harga eceran tertinggi hanya Rp13.000 per kilogram. Ini baru satu komoditas.

Di samping itu, lanjutnya, Gule Kabung menggelar pasar murah menggunakan anggaran pemerintah pusat. “Disperindag bisa menggunakan dana itu untuk beri paket-paket khusus di setiap kabupaten. Sebesar Rp 10,8 miliar masing-masing Belitung dan Pangkalpinang pada periode sama, Desember 2023,” ujarnya.

Menurutnya, gebrakan Gule Kabung tersebut sangat bagus karena gubernur turun langsung ke lapangan. Ini bisa mengakselerasi kerja-kerja Tim pengendalian Inflasi daerah (TPID) yang selama ini cenderung normatif. “Gule Kabung dapat menyiapkan wadah bagi kami, Tim TPID, justru bisa hadir di tengah masyarakat langsung,” kata dia.

Optimalisasi Peran Pemda

Pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi di tingkat lokal. Meskipun kebijakan utama biasanya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk mendukung upaya pengendalian inflasi. Ada beberapa cara yang bisa diambil oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota.

Pengawasan Harga dan Persaingan: Menerapkan regulasi yang memantau dan mengendalikan harga barang dan jasa. Memastikan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha untuk mencegah praktik monopoli atau manipulasi harga.

Pengelolaan Ketersediaan dan Distribusi: Membangun sistem distribusi yang efisien untuk mencegah kelangkaan barang dan jasa. Mendorong ketersediaan barang dengan memfasilitasi perdagangan dan transportasi.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendukung pelaku usaha lokal dan UMKM untuk meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Mendorong inovasi dan diversifikasi dalam sektor ekonomi lokal.

Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, seperti jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi. Pengembangan infrastruktur energi untuk mendukung produksi dan distribusi listrik yang stabil.

Kebijakan Upah yang Seimbang: Menetapkan kebijakan upah yang seimbang agar tidak memberikan tekanan inflasi yang tidak terkendali. Membangun hubungan yang baik antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja: Meningkatkan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Memfasilitasi kebijakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal.

Kontrol Penggunaan Lahan dan Ruang Kota: Merencanakan penggunaan lahan dan ruang kota dengan cermat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mencegah spekulasi lahan dan mengurangi tekanan pada harga properti.

Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Masyarakat: Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan untuk meningkatkan dukungan dan kepatuhan.

Langkah-langkah tersebut dapat membantu pemerintah daerah mendukung stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi di tingkat lokal, meskipun mereka tetap tergantung pada kebijakan ekonomi makro yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan bank sentral.

Dalam konteks Kepulauan Bangka Belitung, operasi pasar dan distribusi komoditas murah lewat program Gule Kabung terbukti efektif menekan inflasi. Mengapa hal itu bisa terjadi? pengawasan pasar dapat menjadi relevan dan dapat diperkuat dengan kebijakan operasi pasar. Operasi pasar adalah suatu tindakan pemerintah untuk memasok barang atau komoditas tertentu ke pasar dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar untuk mengatasi fluktuasi harga yang tidak wajar atau untuk memberikan keberlanjutan ketersediaan barang pokok kepada masyarakat.

Ada beberapa hal terkait operasi pasar dan penekanan inflasi tersebut. Pertama, stabilisasi harga. Pengawasan pasar dapat membantu mendeteksi fluktuasi harga yang tidak wajar atau manipulasi harga oleh pelaku usaha. Operasi pasar dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga dengan memasok barang atau komoditas dengan harga yang terkendali.

Kedua, pemberdayaan konsumen. Dengan memberikan informasi tentang harga dan menjaga transparansi di pasar, pemerintah dapat memberdayakan konsumen untuk membuat keputusan yang informan. Operasi pasar yang melibatkan penjualan barang dengan harga terjangkau dapat memberikan manfaat langsung kepada konsumen.

Ketiga, pengendalian inflasi permintaan. Jika tingkat permintaan sangat tinggi dan menyebabkan kenaikan harga, operasi pasar dapat membantu mengendalikan inflasi permintaan dengan menyediakan pasokan tambahan dan mencegah kelangkaan barang.

Keempat, dorongan untuk persaingan sehat. Pengawasan pasar dapat melibatkan penilaian persaingan di pasar. Operasi pasar yang dirancang dengan baik dapat merangsang persaingan sehat dengan memperkenalkan pilihan baru dan memperluas akses pelaku usaha baru ke pasar.

Kelima, intervensi dalam kondisi krisis. Selama situasi darurat atau krisis ketersediaan barang pokok, operasi pasar dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan pasokan yang memadai dan menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Keenam, penyediaan barang pokok dengan harga terjangkau. Operasi pasar dapat difokuskan pada penyediaan barang pokok, seperti beras, gula, minyak, dan sebagainya, dengan harga yang terjangkau. Hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketujuh, penguatan keterlibatan pemerintah. Dengan melibatkan pemerintah secara langsung dalam operasi pasar, ada kesempatan untuk memperkuat keterlibatan pemerintah dalam mengelola pasar dan mengatasi ketidaksetaraan informasi serta praktik bisnis yang tidak etis.

Penting untuk merancang dan melaksanakan operasi pasar dengan cermat, mempertimbangkan dampak jangka panjang dan potensi distorsi pasar yang mungkin muncul. Pengawasan pasar dan operasi pasar yang baik bersama-sama dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berpihak kepada masyarakat.

Perlu dipertimbangkan, hubungan antara pasokan komoditas murah atau bersubsidi dengan inflasi dapat kompleks dan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk bagaimana subsidi tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi.

Berikut adalah beberapa cara di mana pasokan komoditas murah atau bersubsidi dapat mempengaruhi inflasi:

1. **Pengaruh Terhadap Harga Konsumen.** Jika komoditas bersubsidi adalah barang atau layanan yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat luas (seperti bahan bakar, listrik, atau beras), subsidi dapat membantu menjaga harga konsumen tetap terjangkau. Ini dapat memberikan tekanan inflasi yang lebih rendah di sektor-sektor tersebut;
2. **Pengendalian Inflasi Permintaan.** Subsidi yang efektif dapat membantu mengendalikan inflasi permintaan dengan menjaga harga tetap rendah, terutama untuk barang-barang pokok. Ini mengurangi tekanan pada tingkat permintaan di pasar;
3. **Pengaruh Terhadap Anggaran Pemerintah.** Implementasi subsidi dapat memberikan dampak terhadap anggaran pemerintah. Jika subsidi dibiayai dengan defisit anggaran yang tinggi, hal ini dapat menciptakan tekanan inflasi. Namun, jika dikelola dengan baik, subsidi dapat membantu menjaga stabilitas harga;
4. **Dorongan untuk Produksi dan Pasokan.** Subsidi dapat memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi dan pasokan barang tertentu. Ini dapat memitigasi tekanan inflasi dengan menjaga ketersediaan barang dan layanan;
5. **Distorsi Pasar.** Subsidi yang tidak tepat atau disalurkan tidak efisien dapat menciptakan distorsi pasar. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan barang atau jasa di sektor tanpa subsidi, menciptakan tekanan inflasi lokal;
6. **Efek Keseimbangan Anggaran.** Penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara memberikan subsidi untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan keberlanjutan

keuangan pemerintah. Ketidakseimbangan dapat memengaruhi inflasi melalui dampak pada defisit anggaran;

7. **Pengaruh Terhadap Nilai Tukar.** Subsidi energi atau komoditas lainnya dapat memengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Jika subsidi menyebabkan defisit perdagangan yang tinggi, ini dapat memengaruhi nilai tukar dan berpotensi memberikan tekanan inflasi.

Perlu diperhatikan bahwa keberhasilan atau kegagalan subsidi dalam memengaruhi inflasi juga tergantung pada implementasi kebijakan yang baik dan transparan. Subsidi yang tidak efisien atau bermasalah dalam administrasinya dapat menciptakan distorsi dan bahkan memberikan dampak negatif terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik ekonomi negara atau daerah tertentu ketika mengevaluasi hubungan antara subsidi dan inflasi. Setiap kebijakan ekonomi harus diimplementasikan dengan cermat dan dipantau secara terus-menerus untuk memastikan dampak yang diinginkan.

Gule Kabung sebagai program yang membumi, langsung menysasar ke jantung masalah, efektif menghindari distorsi dan dampak negatif tersebut. Apalagi jika Gule Kabung ini diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang memadai.

Kepala Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ahmad Yani mengungkapkan beberapa contoh. Pada kesempatan acara Gule Kabung di salah satu desa di Kabupaten Bangka, rombongan Pejabat Gubernur Suganda Pandapotan, termasuk Ahmad Yani di dalamnya, datang sekitar pukul 14.00 untuk berdialog dengan warga.

Malam harinya, mereka menggelar acara ramah tamah dengan bupati, walikota, serta para camat dan warga sekitar. Ini salah satu peristiwa penting karena, “Biasanya kami antarbupati dan gubernur sulit duduk bersama masyarakat,” ujar Ahmad Yani menjelaskan gugurnya kesenjangan dan distorsi lewat Gule Kabung tersebut.

Malam itu, Penjabat Gubernur Suganda Pandapotan menyimak keluhan warga serta usul-usul mereka. Masalah yang paling banyak dikeluhkan antara lain tentang pertambangan dan hutan karena masalah itu beririsan dengan pariwisata dan perikanan. Malam itu juga, masalah tersebut langsung dijawab oleh dinas terkait atas instruksi Pejabat Gubernur. Gule Kabung terbukti efektif mengatasi beragam masalah masyarakat, di dalamnya termasuk masalah inflasi.



Gambar 4.2 Komunikasi dengan warga adalah kunci berjalannya program Gule Kabung.

Sumber: Diskominfo/Babel

Gule Kabung sebagai program yang membumi, langsung menasar ke jantung masalah, efektif menghindari distorsi dan dampak negatif tersebut. Apalagi jika Gule Kabung ini diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang memadai.

Bab V

Terobosan Inovatif



PADA SUATU siang yang cerah, Rabu 25 Agustus 2023, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengunjungi rumah pasangan Kaspul Anwar dan Asmara di Kacang Pedang, Pangkalpinang. Suganda berbincang dengan keduanya terutama tentang kondisi anak mereka, Aspari atau yang akrab dipanggil Ari. Kabarnya sudah lama dia mengurung diri, enggan berinteraksi dengan orang lain.

Dalam dialog itu terungkap bahwa Kaspul dan Asmara sudah lama ingin membawa Ari berobat atau memeriksakan diri ke rumah sakit, namun anaknya selalu menolak dan memilih mengurung diri. Suganda menyimak dengan baik pengaduan dan keluhan mereka. Kemudian dibantu petugas dari Rumah Sakit Jiwa dr Samsi Jacobalis, Suganda meminta agar Ari dibawa keluar dari ruangan tempatnya menyendiri.

Dari depan pintu bercat kuning itu, Suganda memperkenalkan diri kepada Ari lalu menjelaskan niatnya untuk bertemu. Tak kurang dari setengah jam Suganda membujuk Ari untuk membuka

pintu. Suganda antara lain menjelaskan bahwa keluarga dan dirinya sangat peduli dengan kondisi Ari dan karenanya siap membantu apa pun yang diperlukan Ari. Setelah mendapat persetujuan dari Ari, pintu pun dibuka dan Ari muncul dengan berkaus merah bergambar tugu Monas dengan bawahan sarung kotak-kotak merah hijau. Pria berkumis dan berambut ikal itu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi di rumahnya. Tatapannya tampak kosong. Suganda lalu mengajaknya bicara terutama tentang rencananya membawa Ari ke rumah sakit.

“Kami senang jika akhirnya Ari bersedia dibawa ke rumah sakit,” kata Asmara yang amat berharap anaknya itu bisa sembuh dan berinteraksi dengan orang lain kembali seperti dulu kala.

Asmara sudah lama ingin merawat anaknya secara memadai. Namun, selama ini ia tidak tahu harus mengadu ke mana, sementara dana tidak mencukupi jika harus membawa anaknya ke rumah sakit. Dia sadar anaknya sedang dililit masalah karena berbulan-bulan tidak mau keluar kamar. Tatkala dibujuk Suganda dan bersedia membuka kamar itu, sampah di dalam kamarnya menggunung.

Ari akhirnya dirawat inap di RSJ dr Samsi Jacobalis di Sungai-liat. Dia didampingi juga oleh perwakilan keluarga. Setelah sebulan dirawat, Ari mengalami kemajuan secara signifikan dari sisi komunikasi maupun kontrol diri. Dia kembali bisa berkomunikasi secara baik dengan orang-orang terutama keluarga, sebelumnya dia cenderung menarik diri karena mengalami paranoia sebagai bagian dari gejala skizofrenia. Oleh karena sudah membaik, Ari diizinkan pulang dan menjalani perawatan jalan.

dr Ria Agustine selaku Direktur RSJ dr Samsi Jacobalis menjelaskan, pihaknya rutin menerapkan kunjungan ke rumah Ari bersama dengan dokter umum, perawat, dan psikiater untuk memantau perkembangan Ari, karena kondisinya tidak bisa dibiarkan begitu saja meskipun terus membaik. “Kunjungan ini untuk

mengasesmen kepatuhan minum obat, keluarga yang menangani, dan kondisinya seperti apa. Juga obatnya yang tersedia seperti apa. Tenaga yang mendatangi sifatnya mengontrol. Keluarga bisa menerima atau tidak. Ini rutin kami lakukan terutama di pulau Bangka,” kata Ria.

Kunjungan ke rumah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kata Ria, merupakan bagian dari program *family supporting group*, sebuah program yang digagas Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App.Sc, guru besar dari Universitas Indonesia. Keliat memandang bahwa peran keluarga amat penting sebagai pilar utama menyokong pasien menuju kondisi lebih baik.

Dalam penelitiannya, dia menyebutkan angka kekambuhan ODGJ tanpa dukungan keluarga berkisar 25 hingga 50 persen, sementara angka kekambuhan ODGJ yang disokong keluarga hanya berkisar 5 persen hingga 10 persen. Di sini terlihat jelas pengaruh signifikan keluarga bagi ODGJ karena keluarga merupakan bagian inti dari sebuah sistem tempat ODGJ tinggal dan hidup.

“Dalam kunjungan ini kami juga mendengarkan semua keluhan keluarga,” kata Ria yang menambahkan bahwa keluarga kerap kali merasa tak sendirian lagi menghadapi masalah anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Setelah itu, mereka merasa lebih mampu untuk menghadapi semua itu.

Bisa dibayangkan, program tersebut amat membantu terbentuknya swabantu (*self help group*), yakni sebuah pendekatan untuk mempertemukan kebutuhan keluarga dan sumber penting bagi keluarga dengan gangguan jiwa (Citron, Solomon, & Draine, 1999 dalam Keliat dkk 2011). Kelompok swabantu bisa juga diartikan sebagai sebuah kelompok (*peer*) tempat anggota saling berbagi masalah atau isu tersentu secara fisik maupun emosional dan kemudian mendiskusikannya untuk mencari jalan keluar.

Sementara itu, sebagaimana dilaporkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, dr Ria Agustine selaku Direktur RSJ dr Samsi Jacobalis mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang ada dua pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terdata di Kota Pangkalpinang. Salah satunya Ari. Pihaknya siap melakukan tindak lanjut untuk menangani mereka.

“Kami memang sebenarnya di RSJ dr Samsi Jacobalis memiliki kegiatan Keswamas (Kesehatan Jiwa Masyarakat) dan juga mungkin animo impact dari kegiatan Gule Kabung sebelumnya terhadap ODGJ dan alhamdulillah kooperatif sekali Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sehingga kita datang hari ini untuk menangani pasien ini,” ujarnya.



Gambar 5.1 Kunjungan ke kediaman Wawan [57], warga Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, penderita orang dengan gangguan jiwa [ODGJ]

Foto: Dodi Firmansyah | Sumber: bangkatengahkab.id

Cerita singkat di atas merupakan salah satu kegiatan dalam program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung) di Kota Pangkalpinang. Program ini muncul sebagai bentuk keseriusan Pejabat Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu untuk memahami permasalahan masyarakat. Dengan turun langsung ke tengah masyarakat, dia ingin sebisa mungkin menghilangkan jarak antara pengambil kebijakan dan orang-orang yang terdampak terhadap kebijakan tersebut. Dengan kata lain, Suganda ingin merasakan tekstur permasalahan secara langsung. Dengan demikian, dia nanti dapat mengambil kebijakan secara tepat.

Ria mengakui, program Gule Kabung sangat monumental bagi lembaga yang dia pimpin, RSJ Samsi Jacobalis. Sebab, lewat program ini pihaknya bisa langsung turun lapangan bersamaan dengan instansi lain seperti bupati dan dinas kesehatan. “Pak PJ dalam program Gule Kabung, beliau bukan sekadar hadir tapi mampu membuat *support* lewat kalimat kepada keluarga. Hadirnya gubernur cukup efektif supaya warga dan instansi lain turut serta,” kata Ria.

Dia menambahkan, domain RSJ hanya RSJ, tidak bisa menjangkau lebih luas karena di luar wilayah tugas pokok dan fungsi. Sementara lewat Gule Kabung, mulai dari tingkat provinsi sampai aparat desa, semua bergerak bersama sehingga lebih efektif menangani orang dengan gangguan jiwa

Gule Kabung, lanjut Ria, juga amat membantu program Layanan Satu Jiwa RSJ Samsi Jacobalis. Pertama, Melakukan kunjungan rumah atau *home visit* pada ODGJ yang mengalami keterbatasan dana. Kedua, kegiatan panjangan pasung dengan sasaran mengurangi maupun membebaskan korban pemasangan di Provinsi Bangka Belitung. Ketiga, mendatangi masyarakat yang keluarganya dirawat inap supaya warga mampu menangani pasien saat waktunya tiba dibawa ke rumah. Keempat, konsultasi

keperawatan bagi warga ke rumah sakit jiwa. Kelima, kegiatan *family supportive group*, bentuknya bisa berupa kelompok diskusi terarah (FGD) antara keluarga pasien ODGJ dan puskesmas untuk saling memberi penguatan. Ini mirip dengan pola pembentukan dan penguatan kelompok swabantu seperti disebutkan di atas.

Family supportive group

Dalam sebuah kesempatan sebagaimana dikabarkan oleh *babelprov.go.id*, psikiater sekaligus Dokter Spesialis Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr Samsi Jacobalis, dr Imelda, mengungkapkan, Family Supportive Group merupakan solusi untuk mengoptimalkan pengobatan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga dan penderita ODGJ. “Kami meyakini, program Family Supportive Group ini, dapat meningkatkan semangat anggota keluarga, dalam mendukung kesembuhan ODGJ,” kata dr Imelda.

Dia menjelaskan, anggota keluarga penderita ODGJ bisa bertemu secara langsung dengan dokter dan petugas puskesmas untuk saling mengenal dan menguatkan. Proses penyembuhan yang panjang butuh *support system* yang bagus dan Family Supportive Group salah satu jawabannya.

Program itu diperkuat kebijakan Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu. Ia mengatakan, kesembuhan ODGJ memerlukan dukungan semua pihak, khususnya dari keluarga penderita ODGJ. Ia meyakini dengan adanya dukungan dari keluarga, maka penderita ODGJ dapat segera disembuhkan.

Dalam sebuah acara terkait Gule Kabung dan Aik Bakung yang berlangsung di Balai Desa Tukak Sadai, Rabu (6/9/2023), turut hadir 10 (sepuluh) perwakilan keluarga ODGJ serta sejumlah pasien yang telah sembuh dari ODGJ. Salah satu perwakilan keluarga penderita ODGJ, Kurniawati, mengungkapkan bahwa

ayahnya sering marah-marah, jalan-jalan, mengamuk, tidur dan keluyuran di hutan, tetapi masih mampu berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, keluarganya kesulitan mengurus ayah yang tidak mau mengonsumsi obat. “Kami bingung harus bagaimana lagi,” jelas Kurniawati.

Menanggapi hal ini, Psikiater sekaligus Dokter Spesialis Kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr Samsi Jacobalis, dr Imelda, mendiagnosa bahwa apa yang dialami oleh ayah Kurniawati tersebut merupakan gejala awal skizofrenia. “Di mana pasien berhalusinasi, mengalami kekacauan pikiran, delusi, merasa terancam dan selalu berusaha membela dirinya. Gejala ini bisa diselesaikan dengan pengobatan,” terang dr Imelda.

Dia lalu mengusulkan agar keluarga ODGJ melakukan beberapa strategi. Salah satu yakni dengan mencampur obat ke dalam makanan ODGJ. Jika hal itu gagal, bisa dengan cara menyuntikkannya. Cara ini bisa ditempuh dengan meminta bantuan tenaga ahli di puskesmas. Di sinilah pentingnya Family Supportive Group tadi.

Pj Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu mendoakan semoga keluarga pasien tabah dan kuat serta ODGJ segera sembuh. “Kita di sini hadir untuk memberikan pengertian dan semangat. Di luar sana masih banyak ODGJ yang tidak terurus karena keluarga mendengarkan stigma-stigma negatif. Jangan biarkan mereka. Segera laporkan ke RSJD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan,” kata Pj Gubernur Suganda sembari mengingatkan warga untuk terus berdoa kepada Tuhan.

Acara Gule Kabung seperti di atas memberi dampak yang tak kecil. Setelah program ini berjalan, terutama terkait penenangan ODGJ, banyak warga secara sukarela melapor. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat sedikitnya 159 ODGJ yang dipasung. Data ini masih tentatif karena ODGJ merupakan fenomena gunung es. Artinya, masih banyak warga yang menutup

diri jika ada keluarganya yang masuk dalam kategori ODGJ karena menanggap itu bagian dari aib.

Sejak Program Gule Kabung berjalan, banyak warga yang kemudian sadar bahwa pemasangan bukan langkah produktif membantu ODGJ. Hingga Pejabat Gubernur Suganda selesai menjabat setidaknya sudah ada 12 pemasangan yang ditangani dan lima di antaranya lepas pasung. “Kami membuat grup WA untuk saling melaporkan,” kata Ria. Grup tersebut beranggotakan pengurus RSJ Samsi Jacobalis, aparat desa dan kecamatan, serta warga.

Lewat grup WA itu, pemerintah dalam hal ini pihak RSJ Samsi Jacobalis, mengkampanyekan pentingnya menangani ODGJ dengan baik dan dengan bantuan pihak rumah sakit. Masih banyak yang memasung ODGJ adalah cerminan bahwa warga belum cukup pengetahuan tentang ODGJ dan cara menanganinya sehingga perlu intervensi pemerintah. Di samping itu, masih banyak yang berpandangan secara tradisional dengan menilai bahwa ODGJ itu fakta supranatural, mereka sakit karena digunakan. Akses kesehatan yang kurang memadai turut memperburuk dua perspektif di atas sehingga banyak yang memasung atau merantai ODGJ di dalam rumah.

Keluarga menolak

Meskipun demikian, belum tentu keluarga ODGJ memahami secara baik. Ada juga yang menolak ketika anggota keluarganya yang ODGJ diminta untuk dilepas pasung. Hal ini misalnya terjadi di Bangka Tengah. Di sana ada seorang ODGJ, Wawan (57), yang sudah 20 tahun mengalami gangguan jiwa dan dikurung di dalam sebuah kamar.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu. Kondisi

yang dialami Wawan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng). Terkait dengan hal itu, Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu bersama Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman ke kediaman Wawan, Kamis (27/07/2023). Ini terkait dengan program Gule Kabung.

Pj Gubernur Suganda kemudian berbincang dengan pihak keluarga, membujuknya. Tak lama setelah itu, Wawan dipindahkan ke RSJ Sungailiat. Jikalau Pj Suganda tidak langsung datang ke lokasi, sulit bagi petugas RSJ untuk bisa memboyong Wawan agar mendapatkan pengobatan yang memadai.

Menurut pihak keluarga, Wawan yang warga Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba ini, sebelum dinyatakan sebagai ODGJ adalah orang baik dan normal. Dia kemudian mengalami banyak tekanan hidup dan tak kuat menghadapinya. Dia lalu menarik diri dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Dia memilih mengurung diri di sebuah ruangan kecil yang menjadi tempat menjalankan hampir seluruh aktivitasnya sehari-hari.

Ketika berada di luar ruangan, dia kerap mengamuk atau melakukan tindakan yang mengkhawatirkan orang-orang di sekelilingnya. Pihak keluarga kemudian membuatkan ruangan khusus untuk mengurungnya. Pihak keluarga berusaha merawatnya dengan baik, antara lain dengan melengkapi ruangan tersebut dengan tempat tidur layak dan toilet.

“Saat pak Pejabat Gubernur datang langsung memang efeknya luar biasa. Padahal, awalnya pihak rumah sakit jiwa dilarang masuk oleh pihak keluarga,” kata dr Ria Augustine selaku Direktur RSJ dr Samsi Jacobalis yang turut serta dalam acara Gule Kabung di atas. Sepekan sebelumnya, pihaknya sudah datang ke rumah pasien ODGJ itu tetapi ditolak dan mereka meminta waktu untuk berunding.

Melihat efektivitas program dengan kehadiran pejabat paling tinggi di tingkat provinsi itu, Ria setuju jika program Gule Kabung diteruskan, siapapun pejabat barunya. Pihak RSJ Samsi Jacobalis sendiri telah meningkatkan anggaran hingga 20 persen untuk menangani ODGJ dengan lebih banyak turun lapangan seiring program Gule Kabung.

Dalam program Gule Kabung, gaya komunikasi Suganda yang dialogis, terbuka, dan kadang diselingi humor itu membuat rakyat tidak sungkan untuk menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Di berbagai forum komunikasi dengan warganya dalam rangkai Gule Kabung itu, Suganda bisa langsung berhadapan dengan warganya yang mengeluhkan berbagai masalah. Mendengar itu, Suganda bisa langsung menyusun langkah strategis menyelesaikan masalah yang muncul.

Simaklah misalnya yang diungkapkan Intan Kurnia, warga di Jalan Nilam, Kelurahan Bacang. Dia menagih janji Wali Kota Pangkalpinang tentang pasokan air bersih PDAM selama musim kemarau. Janji yang disampaikan setahun lalu itu sampai sekarang belum ada realisasinya.

Mendengar keluhan itu, Suganda langsung membantu menagih ke Walikota Pangkalpinang. Dia langsung menginstruksikan PDAM Kota Pangkalpinang untuk mengirim 1 tangki mobil berisi air bersih keesokan harinya. Selain itu, mereka akan memeriksa ketersediaan jaringan PDAM yang jika tidak tersedia, akan dibuatkan sumur bor.

Permasalahan lain yang muncul adalah tentang tempat pemrosesan akhir (TPA) Parit Enam; penerangan jalan yang minim dan menyebabkan peningkatan tindak kriminal serta transaksi narkoba; hingga tentang masalah perhatian terhadap tempat wisata.

Semua masalah yang muncul selama Program Gule Kabung di Kota Pangkalpinang itu segera direspons Suganda dengan

berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dengan demikian, warga langsung mendapat kepastian dan makin percaya kepada pemerintah. Apalagi, keesokan harinya ada janji yang langsung ditepati seperti soal air bersih tadi.

Mengenai sampah, Suganda turut merasakannya. Sebab, acara Gule Kabung yang digelar di Bacang itu berlokasi tak jauh dari TPA Parit Enam. Selama acara berlangsung, aroma sampah turut menyelinap di antara dialog pejabat dan warga tersebut. Hal itu cukup menjadi bukti bahwa ada yang tidak beres dengan pengelolaan sampah di Parit Enam.

Gule Kabung sebagai program yang diinisiasi Suganda ini ternyata diampifikasi oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Di Kota Pangkalpinang, walikota setempat membuat program serupa bertajuk *Ngobrol Sambil Ngopi Bersama Pemerintah dan Masyarakat* atau *Ngopi Pekat*. Tujuannya amat jelas, sebagaimana disampaikan Wali Kota Pangkalpinang Dr H Maulan Aklil atau yang kerap disapa Molen, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Acara ini dia gelar di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat seperti taman atau gedung tertentu. Kelurahan warga tentang segera hal mulai dari penerangan jalan, genangan air, hingga sampah.



Bab VI

Evaluasi

PROGRAM GULE Kabung bisa menjadi pilar menuju sistem pemerintahan yang kuat berpondasi kepada peningkatan layanan publik dan penyerapan aspirasi publik atau masyarakat. Itu prinsip dasar yang memang sudah terbukti berhasil di banyak daerah dan bahkan negara. Beberapa negara yang bisa menjadi contoh adalah Selandia Baru dan Denmark.

Denmark dengan penduduk sekitar 5,8 juta jiwa itu menjadi salah satu negara dengan indeks kebahagiaan paling tinggi. Itu setidaknya berdasarkan Laporan *World Happiness Report* tahun 2019, yang dilakukan *Sustainable Development Solution Network* untuk PBB. Laporan tersebut berdasarkan beberapa paramater yakni, pendapatan per kapita, dukungan sosial dari negara, usia harapan hidup, kebebasan menentukan pilihan hidup, kedermawanan, indeks persepsi korupsi.

Salah satu kuncinya adalah kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan warga. Di Denmark, oleh karena memiliki tradisi panjang di bidang pertanian, pemerintahnya mengeluarkan

kebijakan-kebijakan pro petani berdasarkan kebutuhan mereka. Misalnya, semua petani masuk ke dalam koperasi untuk melindungi hak-hak mereka. Koperasi ini kemudian meluas jangkauannya ke perumahan dan perbankan sehingga petani memiliki akses lebih dan terhindar dari pinjaman dengan bunga yang tak terkendali.



Gambar 6.1 Penyerahan simbolis rehabilitasi tanaman lada

Para petani rutin berkumpul minimal tiga bulan sekali untuk mendiskusikan perkembangan pertanian, keuangan, hingga hal lain menyangkut kehidupan mereka. Dengan demikian, peme-

rintah tahu persis kebijakan yang harus diambil karena berdasarkan aspirasi langsung, tanpa perantara. Proses ini sebangun dengan konsep Gule Kabung yang digencarkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung di masa kepemimpinan pejabat Gubernur Suganda.

Kunci lainnya adalah kemudahan layanan publik berbasis digital. Semua pemangku kebijakan berkoordinasi secara sinkron dan produktif melayani masyarakat dari pusat hingga daerah. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat membantu jika ada warga yang masih kesulitan mengakses layanan publik. Hasilnya bukan hanya warga yang terlayani, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah kian kuat. Ini barangkali bisa ditiru untuk dijadikan agenda ke depan seiring keberlanjutan program Gule Kabung di Bangka Belitung.

Prinsip Good Governance

Program Gule Kabung amat dekat bahkan mempunyai irisan yang luas dengan konsep Good Governance. Good governance merujuk pada praktik-praktik manajemen dan kepemimpinan yang mendukung pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Konsep *good governance* pertama kali menjadi pusat perhatian dan dipopulerkan oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Program Pembangunan PBB (UNDP) pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Tepatnya di penghujung tahun 1980-an. Organisasi-organisasi ini menyadari bahwa tata kelola yang baik adalah faktor kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan.

Pada tahun 1989, Bank Dunia mempublikasikan sebuah laporan berjudul “Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth” yang membahas pentingnya *good governance* sebagai faktor yang mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Sejak itu, *good governance* menjadi pusat perhatian dalam diskursus pembangunan internasional.

Meskipun konsep ini muncul dari organisasi internasional, prinsip-prinsip *good governance* telah diterima secara lebih luas dan dikembangkan oleh berbagai pemikir dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, ekonomi, dan hukum. Konsep ini kemudian diintegrasikan dalam berbagai kebijakan pembangunan dan reformasi pemerintahan di banyak negara di seluruh dunia.

Di bawah ini adalah beberapa prinsip *good governance*.

Francis Fukuyama, ilmuwan politik dan ekonomi menyebutkan bahwa pemerintahan yang bagus harus mempertimbangkan keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Prinsip berikutnya adalah Partisipasi dan Responsivitas yang mengandaikan bahwa masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini ditegaskan oleh Amartya Sen, ekonom yang membahas pentingnya partisipasi dalam pengembangan. Adapun Albert Venn Dicey, ahli hukum Inggris yang mempopulerkan konsep Rule of Law menambahkan bahwa pemerintahan yang baik amat perlu ada Rule of Law (Pemerintahan Berdasarkan Hukum), semua tindakan pemerintah dan individu harus tunduk pada hukum dan peraturan yang adil dan jelas.

Prinsip lainnya adalah Efektivitas dan Efisiensi. Max Weber, sosiologis dan ilmuwan politik yang membahas birokrasi dan efisiensi organisasi menegaskan, pemerintahan yang baik harus

efisien dan efektif dalam penyelenggaraan layanan publik. John Rawls, filsuf politik yang dikenal dengan teori keadilan sosialnya mengutarakan bahwa pemerintahan yang baik amat penting mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik.

Masih ada beberapa prinsip lain terkait *good governance*, tetapi beberapa prinsip di atas amat relevan dengan konsep Gule Kabung. Misalnya dalam hal keadilan dan kesetaraan, dengan peningkatan keaktifan pejabat gubernur ke lapangan, secara langsung menambah jangkauan layanan sekaligus penyerapan aspirasi. Ini bagian penting dari keadilan dan kesetaraan lantaran bukan hanya warga tertentu yang dilayani, melainkan semua strata sosial, bahkan sampai yang paling jelata.

Penilaian terhadap penerapan *good governance* dapat bervariasi, dan hasilnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa negara telah diakui secara luas karena mencapai tingkat *good governance* yang baik, dan ini dapat tercermin dalam berbagai indikator, termasuk transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang baik. Beberapa negara yang sering dikutip sebagai contoh penerapan *good governance* yang baik antara lain:

1. Singapura: Singapura sering dianggap sebagai contoh *good governance* dengan birokrasi yang efisien, rendahnya tingkat korupsi, dan fokus pada kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, catatan hak asasi manusia dan kebebasan sipil menjadi kritik terhadap model ini;
2. Skandinavia (Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia): Negara-negara Skandinavia terkenal karena sistem pemerintahan yang stabil, rendahnya tingkat korupsi, peran masyarakat sipil yang kuat, dan kesejahteraan sosial yang baik;

3. Selandia Baru: Selandia Baru sering kali dianggap sebagai contoh *good governance* dengan pemerintahan yang transparan, rendahnya tingkat korupsi, dan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan keputusan;
4. Kanada: Kanada sering diakui karena tata kelola yang baik dengan tingkat korupsi yang rendah, hak asasi manusia yang dihormati, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik;
5. Hong Kong (sebelum perubahan status politik terkini): Hong Kong dikenal karena tata kelola yang efisien, kestabilan ekonomi, dan tingkat korupsi yang rendah sebelum perubahan status politiknya.

Penting untuk dicatat bahwa tidak ada sistem atau negara yang sempurna, dan setiap negara memiliki tantangan dan kelemahan tersendiri. Selain itu, evaluasi *good governance* sering kali bersifat kompleks dan melibatkan banyak faktor yang berbeda. Selain dari berbagai indeks yang menyediakan peringkat *good governance*, penting juga untuk memperhatikan evaluasi dan pandangan masyarakat setempat serta catatan hak asasi manusia.

Gule Kabung bisa menjadi titik berangkat bagi Provinsi Bangka Belitung menuju tatanan pemerintahan yang lebih bagus atau bahkan seperti negara-negara di atas. Untuk itu, Gule Kabung perlu dikembangkan secara lebih serius. Setelah sekitar delapan bulan dijalankan, berikut adalah beberapa catatan penting untuk dipertimbangkan agar Gule Kabung bisa berjalan lebih bagus.

Berdasarkan catatan lapangan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan, program Gule Kabung agak mepet jarak waktunya antara satu tempat ke tempat lain. Selama ini dilakukan dua pekan sekali dan bahkan ada wacana dipersering menjadi sepekan sekali. Bagi Kurniawan, ini kurang bagus. “Kalau untuk jarak ke lapangannya bisa diatur lebih baik, sebaiknya sebulan sekali atau per tiga minggu,” kata dia. Alasannya, jarak

waktu yang lebih longgar itu dapat memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk berkoordinasi dan menata persiapan lebih matang.

Secara lebih teknis dia menjelaskan, dalam penyelenggaraan Gule Kabung tidak bisa dilakukan secara mendadak. Ketika pejabat gubernur hendak meninjau tempat baru, misalnya, panitia atau PIC dari Biro pemerintahan Provinsi Bangka Belitung perlu survei lapangan untuk memastikan bahwa kondisinya aman. Selain itu, perlu berkoordinasi baik secara administratif maupun secara lisan menata detail-detail yang dibutuhkan di lapangan. Pendekatan ke warga sekitar dan sosialisasi juga amat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau hal yang tidak sesuai target.

Yang tak kalah penting, lanjut Kurniawan, pemilihan isu di lapangan. Sebab, kadang kala ada kesenjangan pemilihan isu atau masalah. Jangan sampai isu yang dianggap penting oleh Pemerintah provinsi justru kalah penting dengan isu lain yang disodorkan warga atau pemerintah kabupaten.

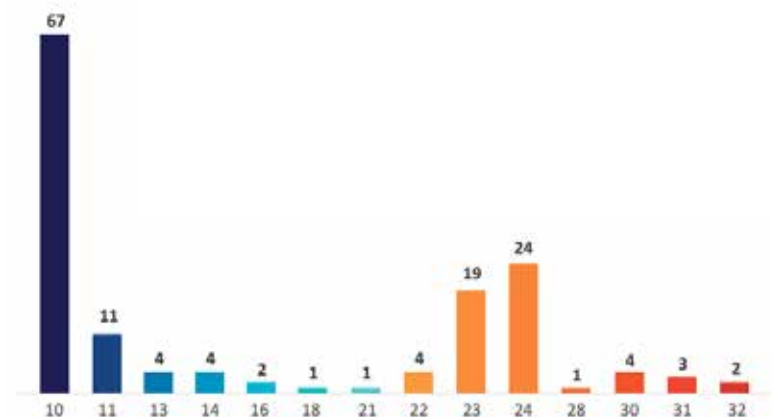
Misalnya ini terjadi di Kabupaten Bangka Tengah pada Agustus 2023. Rencana awal Penjabat Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu hendak melihat langsung masalah stunting (tengkes), inflasi, dan kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Dusun Tanjung Tedung Kecamatan Sungai Selan. Untuk menuju ke sana butuh menyeberang dengan perahu dengan waktu tempuh 15 menit sampai 20 menit. Namun kemudian muncul isu lain yang dianggap lebih serius dan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yakni masalah pembangkit listrik tenaga torium yang digagas PT Thorchon di Tanjung Belikat, sekitar 170 kilometer dari Sungai Selan.

“Ada keinginan dari pihak swasta untuk berinvestasi terhadap listrik tenaga torium. Katanya ini lebih aman daripada nuklir. Ada satu pulau yang akan dipakai, tapi masyarakat sana belum tahu, sehingga perlu sosialisasi,” kata Kurniawan.

Meskipun isu di Sungai Selan juga penting, tapi Suganda akhirnya beralih ke Tanjung Belikat. Sebab, pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menilai isu torium ini lebih mendesak. Akhirnya pertemuan ini dapat menemukan titik terang antara perusahaan swasta yang hendak berinvestasi dan warga sekitar.

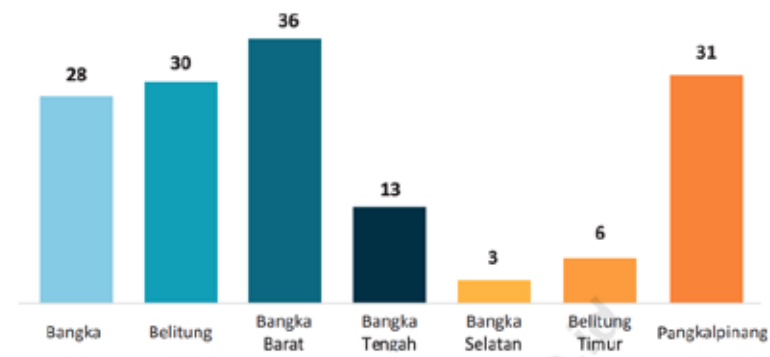
Poin lain yang perlu dievaluasi dari Gule Kabung adalah keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta. Menurut Kurniawan, banyak perusahaan swasta di Bangka Belitung. “Dukungan ketiga belah pihak, yakni kabupaten, provinsi, dan dari pihak ketiga amat penting. Kami butuh CSR di daerah sekitar. Selama ini tahunya ada perusahaan di situ, nah selama ini hadir tidak,” jelas Kurniawan.

Pelibatan pihak perusahaan swasta ini penting untuk membangun harmoni antara warga dan perusahaan terkait.



Gambar 6.2 Jumlah perusahaan industri besar dan sedang menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI] di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023

Sumber: Babelprov.go.id



Gambar 6.3 Jumlah perusahaan industri besar dan sedang menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023

Sumber: Babelprov.go.id

Kesan positif

Sejauh ini, warga mengapresiasi Gule Kabung sebagai program yang positif dan amat membantu pencarian jalan keluar atas masalah-masalah yang selama ini mandek atau tidak terdengar. Gule Kabung tidak hanya melibatkan eksekutif, tetapi juga legislatif, sehingga dapat melihat masalah dari banyak sisi. Mengenai keterlibatan anggota legislatif ini, misalnya, warga jadi tahu lebih dekat tentang sosok yang mereka pilih dalam pemilu. Mereka juga paham bahwa wakil rakyat pilihan mereka itu tidak hanya diam saja, tapi aktif memperjuangkan aspirasi.

“Sosok yang selama ini hanya ada di baliho, hadir. Mereka atau warga merasa diperhatikan dan menyampaikan keluhan-keluhan,” kata Kurniawan.

Kehadiran pucuk pimpinan provinsi beserta legislatif ini efektif menyelesaikan masalah. Apalagi di sana juga hadir unsur-unsur dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Misalnya di sebuah daerah ada kasus penyerobotan lahan yang diduga melibatkan warga. Suganda langsung berinisiasi untuk menggelar dialog dan mencari jalan keluar. Ketika muncul masalah yang bisa

langsung diatasi, dia langsung memberi perintah ke bawahan, misalnya kasus kekurangan air bersih atau kerusakan jalan.

Kesan positif itu juga muncul lantaran pejabat gubernur Suganda Pandapotan amat lihai menjaga perasaan warga. Ini antara lain dilakukan dengan mengutamakan pelayanan warga meskipun dalam kondisi apa adanya. Kurniawan mencontohkan, suatu saat Pejabat Gubernur Suganda Pandapotan hendak menggelar Gule Kabung di sebuah desa di Kabupaten Belitung. Dalam perjalanannya, ada perusahaan kepala sawit yang menawarkan fasilitas lapangan dan gedungnya untuk acara Gule Kabung. Dari sisi kemewahan, jelas fasilitas mereka lebih memadai dibandingkan fasilitas desa. Akan tetapi, Suganda lebih memilih menggelar di desa. Pihak perusahaan kelapa sawit pun dapat mengerti.

Sikap itu diambil Suganda sebagai bentuk penghargaan kepada aparat desa yang telah susah payah mempersiapkan acara. Komunikasi antara warga dan perusahaan kepala sawit pun berjalan lebih lancar di kemudian hari.

Suganda Pandapotan juga menghindari tawaran fasilitas dari anggota legislatif tertentu. Ini jelas sekali alasannya, yakni khawatir pemberian fasilitas itu dipolitisasi dan akhirnya malah kontra produktif dengan program Gule Kabung.

Makna kehadiran

Gule Kabung jelas mensyaratkan pemerintah hadir di tengah-tengah warganya. Kehadiran pemerintah daerah memiliki peran penting dalam konteks *good governance*, dan hal ini tecermin dalam beberapa aspek.

PARTISIPASI DAN RESPONSIVITAS

Pemerintah daerah yang efektif memungkinkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan lokal. Ini menciptakan me-

kanisme responsif di mana kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Kehadiran pemerintah daerah yang transparan memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, anggaran, dan program-program diakses dengan mudah oleh warga. Hal ini mendukung akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemerintah daerah yang hadir dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui program-program pendidikan, pelatihan, dan dukungan bagi inisiatif lokal. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola masalah mereka sendiri.

PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

Keberadaan pemerintah daerah yang efisien memungkinkan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Ini menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi warga.

DISTRIBUSI SUMBER DAYA YANG ADIL

Pemerintah daerah memiliki peran dalam mendistribusikan sumber daya secara adil di antara berbagai wilayah. Hal ini dapat mencegah ketidaksetaraan dan mendukung prinsip-prinsip keadilan.

PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL

Kehadiran pemerintah daerah dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui berbagai kebijakan dan program. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PENANGANAN PERMASALAHAN LOKAL

Pemerintah daerah yang aktif dapat lebih baik memahami dan menangani permasalahan yang spesifik di tingkat lokal, dari infrastruktur hingga isu-isu sosial.

Dalam esensi *good governance*, keterlibatan dan kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah warga merupakan fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, interaksi yang erat antara pemerintah daerah dan masyarakat mendukung pencapaian prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Mari simak betapa menariknya Gule Kabung dijalankan. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung Kurniawan, yang setidaknya tiga kali ikut menginap di rumah warga dalam program Gule Kabung ini menjelaskan, banyak warga yang tak membayangkan didatangi langsung seorang gubernur. Mereka lalu memberikan fasilitas terbaik yang mereka miliki, sungguh pun yang dicari Suganda Pandapotan bukan fasilitas, melainkan keterbukaan dan akurasi informasi tentang masalah warga. “Kami mau tidur di mana pun asal bisa dekat dengan warga. Warga bisa melayani disediakan tempat,” kata Kurniawan.

Biasanya rombongan Pejabat Gubernur Suganda Pandapotan datang di sore hari dan pulang keesokan harinya di siang hari setelah acara Gule Kabung selesai. Sebelum balik ke Belitung, dia selalu balik ke rumah yang dia inapi untuk berpamitan. Jumlah rombongan yang ikut biasanya bisa ditampung di dua rumah sampai 10 rumah. Sebagian besar mereka adalah anggota protokoler, yakni orang-orang yang menyiapkan detail acara Gule Kabung.

Bagi Kurniawan, semua rumah warga yang diinapi itu menyenangkan meskipun mempunyai kesan yang berbeda-beda. Di antara kesan yang berbeda itu, dia amat terkesan dengan rumah warga di pelosok yang ternyata sudah berkeramik, mempunyai toilet duduk, dan dilengkapi dengan penyejuk udara. “Saya terkesan karena itu menandakan ekonomi mereka bagus. Pendapatan warga naik,” kata Kurniawan.



Gambar 6.4 Penanaman pohon oleh Penjabat Gubernur di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Sumber: Diskominfo/Babel

Keuntungan

PROSES PENERIMAAN INFORMASI LEBIH INFORMAL

Dengan tinggal di tengah masyarakat, kepala daerah dapat mengalami secara langsung kondisi hidup dan kebutuhan warganya. Informasi yang diterima dapat bersifat lebih informal dan lebih langsung.

MEMPERKUAT KETERLIBATAN PERSONAL

Ini dapat menciptakan keterlibatan personal yang lebih kuat antara pemimpin dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dan kedekatan.

MENINGKATKAN RESPONSIVITAS

Mengenali aspirasi dan kebutuhan warga dengan lebih dekat dapat meningkatkan kemampuan kepala daerah untuk merespons dengan lebih baik.

Tantangan

REPRESENTASI KESELURUHAN MASYARAKAT

Tinggal di rumah satu atau beberapa warga mungkin tidak mewakili keseluruhan masyarakat. Ada risiko mendapatkan pandangan yang tidak seimbang atau tidak merepresentasikan kebutuhan semua warga.

KETERBATASAN INFORMASI YANG DITERIMA

Informasi yang diterima mungkin terbatas pada apa yang dapat dilihat dan dialami langsung oleh kepala daerah. Aspirasi yang lebih luas mungkin tidak terwakili.

KESULITAN MENERAPKAN HASILNYA

Meskipun informasi dapat diambil, tidak selalu mudah untuk menerapkannya dalam kebijakan atau tindakan konkret.

KESAN PENCITRAAN

Ada risiko bahwa tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya pencitraan politik tanpa dampak yang nyata jika tidak diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kebijakan yang mendukung.

Untuk menghindari hal-hal negatif itu, Kurniawan menambahkan, hal yang juga perlu diperhatikan adalah perangkat monitoring. Sejauh ini belum ada laporan menyeluruh terhadap program-program atau follow dari hasil Gule Kabung. “Harus ada satu tool yang menjembatani itu. Ini laporan apakah secara terpisah diloporkan ke gubernur atau disatukan dengan program. Kalau kami sebatas sisi persiapan. Pemantauan ini perlu formula. Memantau kegiatan ini dari perencanaan komunikasi sampai monitoring,” ujarnya.

Alternatif

Alternatif atau pelengkap pendekatan tinggal di rumah warga bisa mencakup:

DIALOG RUTIN: Menerapkan dialog rutin dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan.

FORUM PARTISIPATIF: Membentuk forum partisipatif yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan.

KUNJUNGAN TERJADWAL: Mengadakan kunjungan terjadwal ke berbagai bagian komunitas.

Semua ini dapat membantu memastikan keterlibatan yang berkelanjutan dan merata dengan masyarakat tanpa menghadirkan potensi kerumitan dan risiko yang terkait dengan pendekatan tinggal di rumah warga.



Tapak Langkah Suganda Pandapotan Pasaribu

SELAMA DELAPAN bulan, yakni dari Maret-November 2023, Dr Suganda Pandapotan Pasaribu menjadi Penjabat Gubernur Bangka Belitung. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pemerintahan, namanya tidaklah asing. Saat ditunjuk menjadi penjabat Gubernur Bangka Belitung, Suganda masih mengemban posisi sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman RI (ORI). Posisi ini dipegangnya sejak Februari 2018. Setelah tidak lagi menjadi Pj Gubernur Bangka Belitung, November 2023, Suganda kembali menempati posnya di ORI.

Karirnya di dalam pemerintahan dan birokrasi merentang sejak tahun 1997. Ia pertama kali menjabat di birokrasi sebagai Kepala Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Wilayah ini tidak jauh dari tempat kelahirannya di Kota Palembang, Sumsel.

Pria jebolan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Bandung, 1997, ini memang memiliki karir yang mulus di bidang birokrasi dan pemerintahan. Keuletannya di birokrasi mensyaratkan kedisiplinan dan kerja keras, serta kecerdasan.

Sikap yang demikian ini tidak lepas dari pengalaman dan kemandirian yang dipelajarinya sejak kecil.

Suganda tumbuh sebagai pribadi yang mandiri sejak usia sekolah dasar. Ini pengaruh dari ibunya yang seorang wirausahawan. Ketika masih SD itu, Suganda berjualan ikan hias, hingga kelak menjadi distributor besar saat dewasa. Selepas kuliah, dia pun meneruskan usahanya dengan membangun kebun karet dan kelapa sawit serta pangkalan minyak tanah. Secara ekonomi, dia sangat mandiri. Namun usaha itu harus dia lepaskan ketika menjadi Sekretaris Jenderal Ombudsman RI.

Suganda menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tidak mudah tergoda oleh iming-iming suap. Ini pengaruh kuat dari ayahnya yang seorang polisi “miskin” yang terakhir menjabat sebagai intel di Polda Sumatra Selatan. Ayahnya sama sekali tidak tergiur dengan beragam iming-iming uang yang oleh karenanya sang istri harus membantu perekonomian keluarga dengan menjadi wirausaha.

Suganda menceritakan, ketika baru beberapa hari menjadi pejabat Gubernur Bangka Belitung, beberapa pengusaha tambang membujuknya dengan berkardus-kardus uang kontan. Tujuannya agar dia memberikan izin tambang meski tak sesuai ketentuan. Semua dia tolak. “Saya ini dari awal sampai menjadi Sekjen Ombudsman tidak mengeluarkan uang seperser pun, juga tidak menerima uang seperser pun,” kata Suganda tentang komitmen antikorupsinya. Baginya, yang layak disejahterakan itu rakyat, bukan pejabat.

Begitu juga saat Lebaran, dia tidak mau menerima THR dari para pengusaha dan membagi-baginya kepada warga yang datang. Jika diuangkan, bisa sampai Rp 500 juta.

Tekad kuat dan keuletan itu menuntunnya dalam jalan birokrasi yang kerap kali penuh kelokan. Karirnya terus menanjak, dari tingkat kecamatan hingga menjadi staf ahli Bupati Musi

Rawas di bidang Ekonomi dan Keuangan (Mei 2013-April 2014). Ia juga pernah menjadi staf ahli Bupati Musi Rawas bidang Pemerintahan dan membantu dalam pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara (April-Desember 2014).

Pada Desember 2014-September 2015, Suganda menjadi Asisten Administrasi Umum di Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya, ia berkesempatan promosi di level nasional dengan menjadi Kepala Biro Umum dan Kepegawaian di Badan Ekonomi Kreatif, pada September 2015-Februari 2018.

Jalan mulus lelaki kelahiran Palembang, 16 September 1973, ini pun terus mendaki. Pada Februari 2018 hingga sekarang, ia menjadi Sekjen Ombudsman RI. Pada Maret 2023, ia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Pj Gubernur Bangka Belitung. Pada November 2023, tugas selaku Pj Gubernur Bangka Belitung itu berakhir.

Suganda memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (2013). Ia juga aktif mengikuti berbagai pendidikan dan latihan di bidang ilmu pemerintahan di dalam maupun luar negeri.

Pengalamannya di bidang birokrasi menjadikannya paham mengenai prinsip-prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itulah, saat ia diberi kesempatan menjadi Pj Gubernur Bangka Belitung, Suganda berusaha memraktekkan prinsip-prinsip tersebut dalam program Gule Kabung, yakni kependekan dari Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung.

Dalam program Gule Kabung, Suganda menerapkan pendekatan kolaboratif dan sinergitas antarinstansi. Tidak hanya instansi pemerintahan, tetapi juga melibatkan kelompok swasta. Ia selalu mengajak para pengusaha untuk berbagi dengan warga. Dalam sekali acara Gule Kabung, misalnya, pengusaha dapat berbagi sepeda, kulkas, sampai telepon seluler.

Pendekatan kolaboratif ini diyakini Suganda akan lebih efektif dalam menysasar problematika di lapangan. Sebab, penuntasan suatu persoalan harus melibatkan berbagai pihak dan dari hulu ke hilir. Kendati demikian, ia menilai masyarakat perlu didengarkan dan diberi solusi langsung atas persoalan-persoalan teknis yang dihadapinya.

Dengan gaya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan, dan sikap ulet serta penuh tekad, Suganda berharap kehidupan birokrasi di Indonesia makin baik, dan prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dengan konsekuen.

Galeri Foto



Beramah tamah dengan masyarakat di Desa Senyubuk, Kelapa Kampit, Belitung Timur.



Sosialisasi tentang pencegahan stunting sejak usia remaja di SMK 1 Manggar Belitung Timur.



Beragam program Gule Kabung dari senam pagi bersama warga hingga penanaman pohon di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.



Pj Gubernur Bangka Belitung didampingi Dinas Kesehatan dan Dinas DP3CSKB dalam penanganan stunting di Desa Baru, Kecamatan Mangar dan Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.



Ramah tamah program Gule Kabung di Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.








NIKMATI KEMUDAHAN LAYANAN PERBANKAN

Dimanapun Anda Berada



Layanan Mobile Banking dari Bank Sumsel Babel yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui aplikasi HP atau tablet berbasis Android dan IOS menggunakan jaringan internet untuk melakukan transaksi financial dan non-finansial.

Fasilitas Bank Sumsel Babel Mobile

1. Informasi Saldo
2. Informasi Riwayat Transaksi
3. Transfer ke Sesama Bank Sumsel Babel
4. Transfer Antar Bank
5. Transfer sesama Bank Sumsel Babel melalui QR Code
6. Pembayaran
7. Pembayaran Merchant melalui QR Code

Segera Download dan Aktivasi
5G Mobile Banking di Handphone Anda!




8. Pembelian
9. Cek Saldo Uang Elektronik BSB Cash
10. Cek Riwayat Transaksi Uang elektronik BSB Cash
11. Top Up Uang Elektronik BSB Cash
12. Informasi KURS
13. Informasi Produk
14. Informasi Berita Lainnya

Bank Sumsel Babel terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS



Call Center
1500711


www.banksumselbabel.com


[Banksumselbabelofficial](#)


[Bank Sumsel Babel](#)


[Banksumselbabelofficial](#)




“ Nabung & Bayar Apapun
CUMA PAKE HAPE ”

- SETOR TUNAI ● TARIK TUNAI
- TRANSFER KE REKENING BANK SUMSEL BABEL
- TRANSFER KE REKENING BANK LAIN (IBFT)
- PEMBAYARAN PDAM ● PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU HALO
- PEMBELIAN PULSA TELKOMSEL ● DLL



Bank Sumsel Babel terdaftar dan diawasi
serta merupakan peserta penjaminan



www.banksumselbabel.com [banksumselbabelofficial](https://www.instagram.com/banksumselbabelofficial)

Bank Sumsel Babel [banksumselbabelofficial](https://www.youtube.com/banksumselbabelofficial)

Call Center
1500711



DIGITAL LOAN BANK SUMSEL BABEL



Dengan Klik Link SMS dari Bank Sumsel Babel,
Pengajuan **KSG** Dapat Diproses
Kapan dan Dimana Saja

**MUDAH,
CEPAT,
DAN
TERPERCAYA**



www.banksumselbabel.com [banksumselbabelofficial](https://www.instagram.com/banksumselbabelofficial) Bank Sumsel Babel [banksumselbabelofficial](https://www.youtube.com/banksumselbabelofficial)

1500711



TABUNGAN TASBIH



TABUNGAN HAJI KHUSUS ANAK-ANAK DAN REMAJA USIA DI BAWAH 21 TAHUN

Set. Awal | Bebas | Asuransi | Integrasi | Manasik | Souvenir
Rp25 K | BY. ADMIN | JIWA | SISKOHAT | Haji Gratis | Haji Gratis

dapatkan LAYANAN PEMBUKAAN di seluruh OUTLET BANK SUMSEL BABEL



AYO
HAJI
MUDA

Bank Sumsel Babel terdaftar dan diawasi oleh OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS

@banksumselbabelsyariah http://www.banksumselbabel.com



Tabungan Kaffah iB

Simpanan berkah dengan berbagai keunggulan dan kemudahan dalam bertransaksi

Dengan prinsip Mudharabah Mutloqoh

- ✓ Bagi hasil kompetitif dan dapat dipotong zakat secara otomatis
- ✓ Dapat ditarik dan disetor di seluruh jaringan kantor Bank Sumsel Babel (Syariah dan Konvensional).
- ✓ Kartu ATM dapat digunakan di ribuan mesin ATM dan EDC di seluruh Indonesia



Call Center
1500 711

Tabungan ini bisa dimiliki oleh nasabah

Hanya dengan melampirkan fotokopi identitas diri dan setoran awal Rp. 300.000,-

Bank Sumsel Babel terdaftar dan diawasi oleh OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS

www.banksumselbabel.com @banksumselbabelsyariah Bank Sumsel Babel Syariah Bank Sumsel Babel iOfficial

Menerima Gadai Emas & Cicil Emas

Biaya Lebih Rendah, Proses Cepat dan Praktis

Gadai	Cicil
<ul style="list-style-type: none"> Barang berupa Logam Mulia (LM) atau perhiasan Taksiran tinggi dengan biaya murah Jangka waktu fleksibel dan dapat diperpanjang 	<ul style="list-style-type: none"> Barang berupa emas Logam Mulia (LM) Antam Margin rendah & angsuran murah Dana awal (DP) minimal 20% Jangka waktu fleksibel



Call Center
1500 711

Bank Sumsel Babel terdaftar dan diawasi serta merupakan peserta penjaminan

Kredit Griya Sejahtera BANK SUMSEL BABEL

Rumah Idaman
Bukan lagi sekedar impian



Bank Sumsel Babel terdaftar dan diawasi serta merupakan peserta penjaminan

Kembangkan Bisnismu
dengan **Kredit Investasi**
BANK SUMSEL BABEL



Bank Sumsel Babel anggota dan mitra serta merupakan peserta perjanjian

DAPATKAN TOTAL HADIAH
UNDIAN TABUNGAN PESIRAH
Rp 11 Milyar

**SUPER
GRAND PRIZE**

Uang Tunai **Rp 0,55 Milyar**

Bisa Beli Aset Mewahnya



GRAND PRIZE

- 25 Mobil Toyota RUSH
- 108 Motor Yamaha MIO
- 54 TV LED
- 54 Laptop
- 54 Lemari Es



**TINGKATKAN TERUS SALDO
TABUNGAN ANDA !!**

Hanya di Pesirah, hidup jadi mudah

Segera Download dan Aktifasi
📱 Mobile di Handphone Anda!

www.banksumselbabel.com

Bank Sumsel Babel
Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Berita dan update Peserta Pengiriman LPS



REBUT HADIAH MILYARAN RUPIAH

Dengan menabung di SIMPEDA
Bank Sumsel Babel

Tingkatkan terus saldo tabungan anda dan

Jadilah Pemenang



Bank Sumsel Babel adalah dan akan terus meningkatkan peranannya



serta merupakan peserta pemantauan



www.banksumselbabel.com



[Bank Sumsel Babel Official](#)



[Bank Sumsel Babel](#)



[BankSumselBabelOfficial](#)